

# PENDERITAAN RAKYAT PAPUA SENGSARA YESUS MASA KINI

Refleksi Soteriologis atas Penderitaan Rakyat Papua

Abdon Bisei

16

**Abstract:** Poverty, injustice, oppression and death are undebatable experienced by so many people in Papua. This reality has reduced human dignity up to the lowest level. That's why the repeated of facts alike must be rejected either from the view point of history or christian's faith.

The historical aspect of the Papuan suffering will be reflected in the perspective of christian salvation history. Three important points will be described and reflected, those are realities of the Papuan suffering, soteriological reflection on it, and finally thoughts on Church duty among the Papuan people.

**Keywords:** penderitaan rakyat Papua • sejarah • sengsara Yesus • kebangkitan • keselamatan •

Artikel ini mau menyoroti realitas rakyat Papua ditinjau dari segi teologi. Dua hal yang mau didiskusikan adalah pertama-tama paparan realitas rakyat Papua di hadapan kita melalui analisis sosial. Berdasarkan analisis sosial tersebut, akan diupayakan suatu refleksi teologis dengan menanyakan apakah realitas di Papua dapat direfleksikan secara teologis. Adakah pengalaman rakyat Papua yang secara meyakinkan dapat disejajarkan dengan pengalaman hidup Yesus? Manakah pengalaman rakyat Papua yang dapat menjadi fokus untuk mendiskusikan keselamatan kristiani sebagaimana diwartakan Yesus dan diteruskan oleh Gereja? Manakah pengalaman Yesus yang dapat disejajarkan dengan pengalaman rakyat Papua? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksud untuk merohanikan pengalaman-pengalaman rakyat Papua, dan juga tidak dimaksud untuk menyejajarkan hidup Yesus di Papua. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk mengumuli iman kristiani atas realitas.



Dengan kata lain, realitas Papua dijadikan pusat meditasi untuk menemukan pesan wahyu yang dapat ditelusuri melalui pengalaman sejarah Yesus. Oleh karena itu, tidak semua pengalaman rakyat Papua diangkat menjadi wacana untuk mendiskusikan iman kristiani. Pengalaman rakyat Papua yang mau diangkat dalam refleksi hanyalah pengalaman yang sungguh-sungguh memperlihatkan ciri yang sejajar dengan pengalaman Yesus untuk memperkaya dan/atau dapat mempertanyakan makna iman kristiani kita. Demikian juga tidak semua pengalaman Yesus dijadikan cermin untuk memantulkan pengalaman rakyat Papua tetapi hanya pengalaman Yesus yang sungguh-sungguh menyingkap pengalaman rakyat Papua dalam situasi mereka. Di sini terjadi pilihan secara sengaja, baik dalam menentukan realitas rakyat Papua masa kini maupun dalam menempatkan pengalaman hidup Yesus masa lampau yang akan dijadikan fokus refleksi teologis. Dengan demikian alur percakapan akan bergerak dalam dua kutub secara simultan yakni realitas dan wahyu, keduanya senantiasa saling menafsirkan satu sama lain. Wahyu ditafsirkan oleh realitas dan realitas ditafsir oleh wahyu dalam bingkai iman kristiani. Dari dinamika ini diharapkan suatu sintesa teologis yang dapat membantu untuk merumuskan tugas panggilan gereja bagi rakyat Papua.

### **Rakyat Papua: Kisah yang Terabaikan**

Ada 4 (empat) hal yang akan dijadikan fokus perhatian untuk mendiskusikan realitas Papua masa kini yakni: kemiskinan, kekuasaan, keamanan, dan kesehatan.

- Kemiskinan menarik untuk didiskusikan karena terdapat fenomena empiris yang kontradiktoris antara kekayaan alam yang berlimpah dan peredaran uang yang tinggi di Papua dengan penderitaan rakyat yang disebabkan oleh keterbatasan pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*) rakyat.
- Kekuasaan diangkat dalam artikel ini karena terdapat indikasi bahwa kekuasaan yang ada lebih bersifat mengamankan pemegang kekuasaan daripada menyejahterahkan rakyat.
- Keamanan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kekuasaan. Namun dalam artikel ini difokuskan pada kisah tuturan kenangan penderitaan sejumlah besar rakyat Papua akan tindakan kekerasan dan pembelokan permasalahan di tanah Papua.
- Kesehatan akan menitikberatkan pada realitas penderitaan rakyat yang disebabkan oleh epidemi virus HIV/AIDS yang mematikan.



### *Kemiskinan Struktural: Lapar karena Diperdaya*

Data kemiskinan rakyat Papua dipublikasikan oleh UNDP,<sup>1</sup> BPS-Papua,<sup>2</sup> BKKBN Papua.<sup>3</sup> Ketiga instansi ini meski menggunakan kriteria yang berbeda dalam menentukan tingkat kesejahteraan rakyat, tetapi hasilnya memperlihatkan bahwa mayoritas rakyat Papua (>75%) berada dalam keadaan miskin. Di samping hasil penelitian tersebut, realitas empiris yang ada di Papua dengan sejumlah kejadian, misalnya bencana kelaparan di kabupaten Tolikara, Yahukimo, Jayawijaya, Puncak Jaya, dan Paniai, menunjukkan bahwa kemiskinan rakyat Papua bersifat absolut dan ekstrim. Bersifat absolut karena hal-hal pokok (*basic needs*) yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup nyaris tak terpenuhi. Kemiskinan absolut menyata melalui bencana kelaparan, buruknya kesehatan yang menimbulkan berbagai penyakit yang diderita rakyat serta angka kematian yang tinggi. Kemiskinan bersifat ekstrim karena keterbelakangan rakyat Papua dalam hal pengelolaan teknologi akibat pengetahuan yang rendah, tingginya angka buta huruf, keterampilan yang terbatas dan keahlian yang minim. Rakyat hanya memiliki tenaga (otot) untuk mengolah sumber daya alam dengan pengetahuan seadanya yang diwariskan kepada mereka. Kemiskinan yang bersifat absolut dan ekstrim ini mengurangi peluang rakyat Papua untuk keluar dari kondisi yang terpuruk dan karenanya menurunkan derajat dan martabat rakyat Papua ke titik tidak manusiawi.

Realitas kemiskinan ini merupakan hal yang sangat kontradiktoris bagi rakyat Papua di tanah Papua, sebab di satu pihak peredaran uang sangat tinggi<sup>4</sup> beserta sumber daya alam yang begitu kaya<sup>5</sup> berbanding

---

<sup>1</sup> Papua merupakan provinsi kedua termiskin di Indonesia setelah NTB. ([www.undp.go.id](http://www.undp.go.id) "final reports 2004"). Bandingkan juga data-data dalam [www.papua.go.id/bps/dda%202002/SOSIAL.htm](http://www.papua.go.id/bps/dda%202002/SOSIAL.htm) (hal. 51.Tabel 4.2.24)

<sup>2</sup> Penduduk Papua tahun 2003 berjumlah 2.469.785 orang. Dari jumlah tersebut, 2.081.820 jiwa (lebih dari 80 %) adalah penduduk miskin, dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 437.520 keluarga. (BPS Papua 2003: 90).

<sup>3</sup> Keluarga miskin di Papua sebanyak 350.133 keluarga, (75%) dari total Rumah Tangga Papua (BKKBN Papua, 2002).

<sup>4</sup> Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, ditetapkan Dana Otonomi Khusus (DOK) sebesar 2% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional (UU 21: fs 33 § 3. e). Tahun 2002 DAU nasional sebesar Rp 69,114 milyar. DOK yang diterima adalah 2 % dari DAU yakni sebesar Rp 1.382.300.000.000,- . Pada tahun anggaran 2003 DAU sebesar Rp 76,978 milyar, DOK yang diterima Rp 1.539.559.850.000,- (mengalami peningkatan 11,38% dari tahun sebelumnya). Kontribusi DOK untuk pendapatan daerah provinsi Papua sebesar 67,72% (2002) dan 63,52 % (2003), sedangkan 32,28% (2002) atau 36,46 % (2003) berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK), (Umar,

terbalik dengan jumlah penduduk yang sangat sedikit namun mayoritas rakyat hidup dalam kemiskinan. Di lain pihak pemerintahan pusat mendapatkan pajak dari provinsi Papua no 3 tertinggi<sup>6</sup> di antara provinsi-provinsi Indonesia, namun ranking kesejahteraan berada pada urutan kedua termiskin di Indonesia.<sup>7</sup> Ternyata tingginya peredaran uang di Papua, kekayaan sumber daya alam yang besar, penerimaan negara dari sektor pertambangan dan penggalian yang sangat signifikan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Sumbangan Papua yang begitu besar dari sumber daya alamnya yang kaya terhadap negara tidak diimbangi dengan pembagian kekayaan secara adil ke provinsi Papua. Kekayaan alam Papua tidak serta merta menjadikan rakyat Papua hidup dalam standar yang layak.

---

2006: 72). Data ini menunjukkan bahwa jumlah uang OTSUS di Papua memang tinggi. Belum terhitung uang yang dikelola lembaga-lembaga non pemerintah serta perusahaan-perusahaan besar. Jika semua dihitung dengan cermat, maka angka peredaran uang di Papua, dapat mendekati 20 digit penulisan.

<sup>5</sup> Kantor wilayah Pertambangan dan Energi Provinsi Papua (2001) menunjuk 95 titik/tempat di Papua yang mengandung bahan galian/pertambangan. Emas dan perak yang sudah ditambang terdapat di Tembagapura. Selama 1993-1998 PT. Freeport, menambang sebanyak 1.800.244.000 ton, sedang daerah-daerah lain yang sudah terdata mempunyai potensi emas aluvial adalah kab. Jayapura, Yapen-Waropen, Biak, Manokwari dan Sorong. Tembaga terdapat di Pegunungan Tengah (PT. Freeport) yang sedang ditambang dengan total cadangan 1.899.240.000 ton. Tempat-tempat lain yang belum ditambang adalah kab. Jayapura, Merauke, Paniai. Selain itu terdapat 10 cekungan minyak dan gas bumi, sebagian telah dieksplorasi. Dari yang dieksplorasi 2 cekungan sudah produksi. Daerah cekungan minyak terdapat di kab. Sorong, Makokwari, Fakfak dan Merauke. Secara umum produksi minyak bumi sampai akhir tahun 1998 sebesar 69.668 m<sup>3</sup> dan gas bumi sebesar 351.01 MMSCF (*Million Metric Standard Cubic Feet*). Batubara diperkirakan mempunyai cadangan sebesar 195.000.700 ton. Terdapat di daerah kab. Manokwari, Sorong dan beberapa daerah lain. Sampai sekarang cadangan batubara ini belum dieksplorasi. Nikel dan Kobal, ada dua tempat yang telah ditambang (keduanya di kab. Sorong) yang mempunyai cadangan masing-masing di pulau Waigeo 63,14 juta ton, dan pulau Gag sebesar 262 juta ton. Krom terdapat di kab. Sorong dan Jayapura, namun belum dieksplorasi. (Kanwil Pertambangan dan Energi Provinsi Papua: 2001)

<sup>6</sup> Pendapatan negara yang berasal dari provinsi Papua sebesar 56,73% dari total pajak nasional. Itu pun baru dihitung yang dikelola oleh PT. Freeport. Bahan galian lain dan hasil hutan belum terhitung (BPS 2003: 453).

<sup>7</sup> Sebagai gambaran Provinsi DI Yogyakarta dari segi pendapatan menduduki ranking ke-20 namun dari segi IPM Yogyakarta menempati ranking ke-3 (laporan UNDP: 2007).

Cukup menarik bagi kita untuk mencermati ironisnya kenyataan kemiskinan, dengan mengamati realitas empiris kota-kota dan desa-desa di Papua. Sejak tahun 2003; pada satu sisi di kota-kota (provinsi dan kabupaten) terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor (motor dan mobil) baik yang berplat nomor Papua maupun luar Papua (khususnya Sulawesi dan Jawa) entah dinas, pribadi maupun umum. Selain itu bertumbuh pula rumah toko (ruko) bak cendawan di musim hujan, demikian juga peningkatan transportasi udara ke daerah-daerah pedalaman serta ke luar Papua baik frekuensi maupun armada penerbangan, bertambahnya frekuensi dan armada transportasi laut baik intern Papua untuk kota-kota pesisir pantai maupun ke luar Papua. Ternyata pada sisi lain, mayoritas rakyat Papua di pedalaman tidak tercukupi kebutuhan pokok untuk menjalani hidup mereka. Terjadi jurang yang lebar antara mayoritas rakyat Papua yang tidak memiliki apa-apa dengan minoritas orang yang menumpuk kekayaan.

Realitas kemiskinan rakyat Papua dapat dicermati melalui korelasi antara keterbelakangan rakyat dengan kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing. Investor yang akan menanamkan modal di Papua dengan membuka perusahaan mengharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang kompeten dari segi pengetahuan, keterampilan (*skill*) dan afeksi terutama relasi sosial dan etos kerja. Mayoritas rakyat Papua yang terbelakang dalam hal pendidikan dan penguasaan teknologi tidak terserap ke dalam lapangan kerja. Andaikan mereka terserap, pemberian jasa atas pekerjaan mereka sangat tidak memadai. Mereka yang memiliki keahlian dan keterampilan pada umumnya berasal dari luar Papua. Mereka mendapat tanggungjawab yang besar dan mendapatkan sejumlah fasilitas serta gaji yang tinggi. Dengan demikian tingkat kesejahteraan mereka pun semakin baik dari waktu ke waktu. Penghasilan yang diperoleh melebihi kebutuhan yang diperlukan mendorong mereka untuk menginvestasikan hasil kekayaan. Di sinilah terjadi penumpukan kekayaan oleh sebagian kecil rakyat sementara mayoritas rakyat Papua berada dalam kemiskinan.

Jadi realitas kemiskinan yang ekstrim di Papua pertama-tama bukan kemiskinan yang bersifat individual sebagai akibat dari perilaku individual, juga bukan karena faktor alam yang tandus dan kering. Kemiskinan di Papua sudah merupakan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang dialami rakyat Papua karena distrukturkan oleh sistem ekonomi-sosial-politik masyarakat dan negara yang membuat bagian terbesar rakyat Papua tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang tersedia bagi mereka (bdk. Soemardjan, 1980: 5). Struktur itu dimanfaatkan oleh para penentu kebijakan (*policy makers*) yang memiliki kekuasaan, (misalnya pejabat-pejabat eksekutif, legislatif); dan mereka yang memiliki akses terhadap penentu

kebijakan seperti pengusaha/kapitalis (pemilik modal), elit-elit militer (pemilik senjata) dan keluarga-keluarganya serta kroni-kroninya untuk kepentingan mereka sendiri.

Kolaborasi antara penguasa (kekuasaan: birokrat dan politisi), pengusaha (ekonomi dan keuangan) dan militer (senjata dan kekerasan) menciptakan suatu sistem kekuasaan yang cenderung oligarkis. Hasilnya dari segi ekonomi terjadi penumpukan kekayaan bagi sekelompok kecil orang yang berkuasa dan kemiskinan struktural bagi mayoritas rakyat Papua. Realitas empiris memperlihatkan makin banyak orang hampir tidak memiliki apa-apa dan hanya sedikit orang yang memiliki kekayaan yang menumpuk dan berlimpah. Penumpukan kekayaan bukan hanya dilakukan oleh para penentu kebijakan di pusat tetapi juga cenderung meluas ke provinsi dan kota/kabupaten di Papua. Keuntungan sumber daya alam di Papua, disedot sebanyak-banyaknya ke pusat kekuasaan (kota kabupaten dan Provinsi dan Jakarta) dan tertumpuk pada lingkaran kekuasaan pusat (oligarkis).

Pengolahan sumber daya alam Papua masih bersifat ekstrak, berupa bahan mentah atau setengah jadi, sehingga tidak menumbuhkan struktur ekonomi yang berkualitas di kalangan rakyat dan tidak mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat Papua secara langsung. Redistribusi dari pusat ke daerah tidak langsung kepada rakyat tetapi melalui pusat kekuasaan eksekutif di daerah, baik di provinsi maupun kota/kabupaten. Mekanisme demikian merupakan hal yang wajar, namun menjadi tidak efektif karena ada tuntutan kepentingan elit birokrat, dari pihak pembuat peraturan daerah (legislatif), kelompok yang mengklaim berjasa dalam mengorbitkan kepala daerah (partai politik, pengusaha) menuntut untuk mendapatkan bagian, maka terjadilah *share* di antara mereka. Tali temali yang demikian menghasilkan mental koruptif di kalangan-kalangan pejabat dan penentu kebijakan.<sup>8</sup> Akibatnya rakyat hanya mendapatkan remah-remah yang jatuh.

---

<sup>8</sup> *Cenderawasih Pos*, koran lokal Papua 20 November 2007, membuat *head line*, "Papua Dianggap Provinsi Terkorup nomor dua setelah Riau". Hal ini dikatakan oleh Hussein Rahayaan ketua Sub Tim III Panitia Ad Hoc IV DPD-RI. Rahayaan mengungkapkan hal itu berdasarkan hasil temuan BPK sejak tahun 2005. Terdapat 355 temuan BPK dengan penyelewengan dana oleh instansi terkait sebesar Rp 5, 7 trilyun.

### *Kekuasaan: Terpasung dalam Pangkuan<sup>9</sup>*

Simpul-simpul sejarah perjalanan rakyat Papua dalam tangan penguasa akan diulas melalui tiga masa yakni Belanda, UNTEA (*United Nations Temporary Executive Authority*) dan Indonesia. Ketiga momen sejarah kekuasaan ini berlangsung secara linear dengan *starting point* yang pasti berdasarkan keputusan politis dan aspek hukum formal legal. Meski harus disadari bahwa *starting point* untuk kekuasaan tersebut hanya merupakan pintu tiba (*arriving point*) dari akumulasi kepentingan yang sudah terendap lama pada pihak yang ingin berkuasa atas Papua.

Papua berada dalam pangkuan Belanda sejak tahun 1828 sampai dengan tahun 1960-an. Selama lebih dari 130 tahun terjadilah suatu “simbiosis mutualistisma” antara pemerintahan Belanda dengan rakyat Papua. Belanda mengharapkan Papua sebagai “rumah masa depan” bagi kaum peranakan. Harapan ini direalisasikan dengan anggaran pemerintahan yang besar untuk Papua. Pelaksanaan dari perencanaan tersebut berupa pembukaan sejumlah perkebunan di Papua, pembangunan pada sektor infrastruktur perkantoran, sarana dan prasarana transportasi, pendirian Sekolah Pamongpraja (*bestuurschool*) di Hollandia. Dengan jalan ini di satu pihak Belanda mendapat pemukiman “koloni” baru di Papua, serentak mendapatkan tenaga kerja murah dari rakyat setempat. Pada pihak lain, rakyat menjadikan kaum kolonis (Belanda) sebagai tameng menghadapi dominasi orang luar baik dari sesama Papua maupun Non Papua. Pendidikan melahirkan sejumlah elit lokal yang memiliki nasionalisme Papua yang setia kepada Belanda. Rakyat Papua memperoleh upah dalam bentuk uang dari pekerjaan mereka.

Intensitas perhatian Belanda terhadap rakyat Papua mengalami peningkatan pada dasawarsa 1960-an, manakala pemerintahan Belanda, membentuk *Nieuw Guinea Raad*, (NGR; 1960) semacam badan legislatif Papua minus hak budget beranggotakan 28 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Papua dan Belanda. Pada tahun 1960 dibentuk batalyon sukarelawan Papua (*Papua Vrijwilligers*) berkedudukan di Manokwari. Disusul setahun kemudian (1961) pembentukan Komite Nasional, semacam panitia persiapan kemerdekaan Papua, berjumlah 21 orang. Pada 1 Desember 1961

---

<sup>9</sup> Studi tentang perjalanan sejarah kekuasaan di Papua dari sisi rakyat Papua ditelusuri melalui Herlina (1985), Osborne (1985), Djopari (1995), Alua (2000), Pigay (2001), Schrool (2001), Drooglever (2005). Data-data historis dari sumber-sumber ini kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain. Kami menggunakan sumber-sumber tersebut bukan untuk merujuk pada peristiwanya tetapi terutama pada proses dan dinamika politis yang terjadi dan yang mempengaruhi realitas politis rakyat Papua dari penguasa pada waktu itu.

berkibarlah bendera *Sampari* diiringi lagu *Hai Tanahku Papua* sebagai simbol kedaulatan dan kemerdekaan Papua. Pada awal 1962, dibentuk 10 dewan daerah (*streekraad*). Pembentukan badan-badan tersebut kemudian disusul dengan pengibaran bendera menunjukkan bahwa secara politis Papua telah disiapkan secara hampir permanen menjadi satu negara (*state*) yang berdaulat.

Pendekatan Belanda yang demikian, tidak mempengaruhi seluruh rakyat Papua. Terkecuali kelompok terbatas yang ada di sekitar lingkaran kekuasaan terutama anggota NGR dan anggota Komite Nasional, Sukarelawan Papua, alumni *bestuurschool* dan atau rakyat Papua yang bertempat tinggal di sekitar pusat administrasi politik dan kekuasaan serta koloni Belanda.<sup>10</sup> Kelompok terbatas ini merupakan elit-elit lokal Papua, yang mengkonstruksi pikiran mereka bahwa Belanda bukan penjajah tetapi penyelamat. Kontruksi pikiran tentang itu, kemudian digelindingkan oleh elit-elit Papua kepada rakyat Papua secara keseluruhan (baik pegunungan maupun pantai, dari utara sampai ke selatan) sehingga menjadi pemahaman bersama bahwa Belanda sedang mempersiapkan Papua menuju kemerdekaan politis secara penuh dan defenitif.

Iklim simbiosis-mutualisma Belanda dengan rakyat Papua saat berada dalam pangkuan Belanda yang kemudian berkembang menjadi persiapan kemerdekaan, menimbulkan reaksi dari pusat kekuasaan Jakarta. Kekuasaan Jakarta yang mengklaim, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mengadakan diplomasi politis dan militer untuk merebut Papua.<sup>11</sup> Reaksi awal Jakarta dinyatakan dengan pencetusan TRIKORA (Tri Komando Rakyat) pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta. TRIKORA merupakan momen politis penting, sebab menjadi cikal bakal penyerahan kedaulatan Belanda di Papua kepada pemerintahan Indonesia melalui *New York Agreement* yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962.

Masa Papua dalam pangkuan UNTEA singkat saja, yakni pada tanggal 01 Oktober 1962 sampai 01 Mei 1963 (*de facto*) atau 1969 (*de jure*) (PEMDA 1972). Pada masa yang singkat ini, terjadi suatu proses politik

---

<sup>10</sup> Ini terutama berlaku untuk kota-kota seperti Jayapura, Biak, Manokwari, Fakfak, Merauke/Mindiptana.

<sup>11</sup> Diplomasi politis ditempuh melalui retorika dalam pidato-pidato para pemegang kekuasaan (terutama presiden Soekarno), konferensi-konferensi, lobi internasional hingga ke PBB. Kaum Digulis pun berperan dalam upaya ini. Diplomasi militer melalui penerjunan pasukan-pasukan khusus untuk *infiltrasi* ke Papua baik untuk memprovokasi rakyat Papua melawan Belanda maupun untuk mengkonsolidasi kekuatan untuk suatu serangan jika keadaan mendesak, dan perang terbuka.

yang sangat menentukan bagi masa depan Papua. Dari segi kenyataan (*de facto*) maupun legal formal (*de jure*), Papua berada dalam kekuasaan UNTEA, tetapi yang terjadi sebenarnya UNTEA hanya merupakan "wayang" yang tampil dalam layar politik dengan "dalangnya" Amerika Serikat. Amerika Serikat selalu tampil di permukaan dalam kasus politik di Papua sebagai negara yang netral, namun terjadi sejumlah perundingan rahasia antara Amerika Serikat-Belanda, dan Amerika Serikat-Belanda-Indonesia, yang mengorientasikan Belanda agar menyerahkan Papua kepada Indonesia. Perundingan-perundingan ini diprakasai oleh Amerika Serikat yang didasari oleh kepentingan politis dan ekonomis. Kepentingan politis Amerika Serikat ialah untuk meredam kekuatan komunis Uni Sovyet yang sudah merembes ke Asia dan Indonesia pada waktu itu sedang membangun jaringan dengan Moskow. Kepentingan ekonomisnya tidak lain berhubungan dengan kandungan sumber daya alam yang ada di bumi Papua.<sup>12</sup> Karena keadaan sosial ekonominya yang kurang menguntungkan pada waktu itu, Belanda digiring oleh Amerika Serikat dan terpaksa menandatangani perjanjian New York yang merupakan kekalahan telak baginya dan kemenangan besar pemerintah Indonesia. Ironisnya pembicaraan tentang status politik Papua, terjadi antara Belanda, Indonesia serta Amerika Serikat (PBB), dan tidak pernah melibatkan rakyat Papua. Tanah Papua dan status politiknya dibicarakan tetapi rakyat Papua tidak dihiraukan. Jelaslah bahwa seluruh proses yang terjadi dalam masa UNTEA yang singkat, bukannya penyelesaian masalah keadilan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat rakyat Papua tetapi kepentingan Amerika, Belanda dan Indonesia.

Reaksi yang muncul di kalangan rakyat Papua mengkristal dalam dua kutub kekuatan yang berseberangan, yakni anti integrasi (Pro Papua Merdeka) dan pro integrasi (menyatu dengan Indonesia). Kelompok yang anti integrasi masih terbagi lagi dalam kelompok yang mau bekerja sama dengan Belanda dan yang menolak kerjasama dengan Belanda. Elit-elit lokal terdidik Papua terfragmentasi dalam kelompok-kelompok ini dan memobilisasi rakyat Papua ke dalam lingkaran pengaruh masing-masing. Perjanjian New York ternyata telah menimbulkan perpecahan di tengah elit terdidik Papua dan berdampak pada rakyat. Sikap Belanda yang mulai berpihak ke Amerika Serikat dan karena itu menguntungkan Indonesia, dipandang oleh kelompok anti integrasi sebagai suatu cara sistimatis untuk menganeksasi kemerdekaan yang telah dipersiapkan Belanda. Sikap Belanda

---

<sup>12</sup> Kemudian menjadi jelas bahwa setelah itu diadakan kontrak I antara Indonesia dengan Amerika Serikat, pada 07 April 1967 untuk penambangan tembaga di Tembagapura. Kontrak ini didasarkan pada penelitian Dr. Jean Jacques (asal Belanda) pada tahun 1936 (Alua, 2005: 57).



yang demikian dinilai sebagai bentuk pengkianatan terhadap rakyat Papua. Masa kekuasaan UNTEA yang singkat, tetapi fragmentasi yang terjadi di tengah rakyat Papua menorehkan konflik sosial antara mereka yang berlangsung terus hingga saat ini. Masa UNTEA bagi sejumlah rakyat Papua sekarang ini tidak pernah menjadi "saat yang sudah terlampau" *the past-past*, di mana mereka melupakan peristiwa tersebut, tetapi tetap menjadi "saat yang selalu diingat" *the past-active*, yang selalu hadir dan aktif dalam pemikiran dan pergumulan mereka yang terlibat dan dikecewakan pada waktu itu. Pada masa UNTEA, rakyat terpecah dalam kelompok-kelompok, sebagai akibat mobilisasi pengaruh di kalangan elit-elit yang memiliki kepentingan politis dan ekonomis. Masa singkat kekuasaan UNTEA merupakan sumber utama kekecewaan dan pemicu konflik rakyat Papua serta seruan yang semakin keras akan kemerdekaan Papua.

Pemerintahan UNTEA berlanjut dengan embrio pemerintahan Indonesia, melalui proses persiapan PEPERA hingga suksesnya PEPERA. Kelompok pro dan kontra Indonesia semakin mengkristal, dan usaha pemenangan pihak pro Indonesia dilakukan melalui berbagai macam cara dari yang paling manusiawi berupa ajakan, pemberian bahan makanan dan insentif, dialog yang jujur dan berkemanusiaan, sampai pada yang paling sadis berupa teror, pemerkosaan dan pembunuhan. Rekayasa proses PEPERA melalui pembelokan sistem *one man one vote* menjadi musyawarah mufakat (*one man many people*) merupakan strategi brilian militer dan pemerintahan Indonesia. Pihak kontra Indonesia baik berupa individu-individu maupun negara lain berkeberatan terhadap pembelokan sistem PEPERA dengan mengajukan petisi kepada PBB, tidak pernah ditindaklanjuti oleh UNTEA. Dokumen petisi tersebut hanya menjadi arsip PBB (PEMDA, 1972; Pigay, 2000: 276-285; Raweyai, 2002: 36-42).

Papua telah berada dalam pangkuan Indonesia selama 5 dasawarsa (40 tahun lebih). Ini diawali dengan periode yang penuh tekanan terhadap rakyat Papua. Kebijakan pemerintahan pusat terhadap Papua memperlihatkan hal-hal yang bertentangan. Kekuasaan politis sipil provinsi Papua yakni Gubernur, diberikan kepada putra Papua, E. J. Bunay, namun dalam kenyataan gubernur Papua hanya menjadi semacam boneka yang dimainkan oleh militer. Roda pemerintahan dikendalikan oleh militer yang dikoordinasi oleh Wakil Perdana Menteri Pertama Koordinator Irian Barat (WAMPA IRBAR) yang merupakan salah satu unsur komando tertinggi pembebasan Papua.<sup>13</sup> Militer juga menjadi sangat dominan dalam

<sup>13</sup> Menurut Intruksi Presiden no. 2 tahun 1963, dengan kualifikasi "rahasia" Bab III, fs. 2 ayat 7, Gubernur dibantu oleh dewan pembantu dan penasehat yang terdiri dari Komando AD, AL, AU, Kepala Kepolisian, Kepala Kejaksaan dan Kepala-Kepala Dinas di wilayah Irian Barat (Pigay, 2001: 259-262).



mengontrol aparat sipil pada setiap level dan jenjang. Semua kepala dinas diangkat oleh WAMPA IRBAR. Militer menyusup sampai tingkat kampung untuk merekrut orang dan mengkoordinir mereka dalam memberi penyuluhan dan pengembangan masyarakat. Rekayasa kekuasaan Indonesia yang paling strategis adalah pembelokan perjanjian New York dalam PEPERA dari sistim *one man one vote* menjadi musyarah untuk mufakat dengan tujuan untuk memenangkan Indonesia dan mengikis habis gerakan Papua Merdeka. Masa awal ini berlangsung hingga PEPERA 1969. Nampak jelas kebijakan militeristik menjadi sangat dominan. Akibatnya polarisasi di kalangan rakyat Papua yang tercipta semasa UNTEA semakin diperkuat dan menjadi terbuka.

Papua, dalam masa Orde Baru, meskipun secara hukum mendapat perlakuan khusus berdasarkan perjanjian New York, namun regim yang berkuasa menerapkan sistim kekuasaan yang sentralistik dan seragam di seluruh Indonesia. Negara ditata dalam sistim otoriter-militer yang berpola otokratik-tunggal. Dominasi militer begitu kuat dalam tata penyelenggaraan negara dan kekuasaan terpusat pada satu orang yang ditamengi Golkar sebagai kekuatan politik, yang berperan untuk melegitimasi keputusan politis. Dari pihak rakyat dituntut loyalitas tunggal terhadap pemegang kekuasaan. Dampaknya terhadap rakyat Papua adalah sikap bungkam terhadap perlakuan tidak adil yang dialaminya. Manakala rakyat berteriak karena gunungnya digusur untuk pertambangan, mereka gampang dicap OPM dan tidak jarang mendapat teror dari pemegang senjata. Tatkala rakyat menyuarkan ganti rugi yang memadai atas tanah, mereka distigmatisasi sebagai pengacau liar Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) dan ditakut-takuti sebagai separatis yang akan "dibereskan". Rakyat Papua kehilangan keberanian untuk mengatakan kebenaran dan takut menyuarkan keadilan. Rakyat terpaksa diam walaupun menderita secara tidak wajar.

Arogansi kekuasaan Jakarta tidak berhenti dengan tumbanganya regim Orde Baru. Regim sesudahnya mengeluarkan kebijakan yang saling bertentangan satu dengan yang lain.<sup>14</sup> Kebijakan yang bertentangan ini

---

<sup>14</sup> 04 Oktober 1999 Habibie menandatangani UU No. 4 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi 3 provinsi. Pemekaran ini mendapat reaksi penolakan yang begitu keras dan luas di tengah rakyat Papua, sehingga akhirnya dibekukan oleh DPRD Provinsi Papua dengan keputusan DPRD No. 11 tahun 1999. 21 November 2001, Megawati menandatangani UU No. 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kalangan rakyat Papua seakan bersikap "*wait and see*". Ide pemekaran Papua kemudian menggelinding, dengan datangnya 250 masyarakat dari Kepala Burung (khususnya Arfak dan Manokwari) pada 19 Septemer 2002 ke istana negara, menuntut reaktivisasi Provinsi Irian Jaya Barat. Mereka disponsori oleh "Irian Jaya Crisis Center". Akhirnya pada 27 Januari 2003, keluarlah Inpres No. 1 tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Irian Jaya. Diawali pendirian provinsi Irian

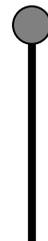


melahirkan konflik di antara rakyat Papua. Polarisasi konflik tidak jarang dibalut oleh sentimen primordialisme etnis yang masih sangat kuat. Sentimen etnis di tengah rakyat dimanfaatkan oleh elit-elit lokal yang memiliki kepentingan politis instan dan jangka pendek. Rakyat Papua bagaikan gerbong yang ditarik oleh lokomotif elit-elit yang memiliki kepentingan politis dan ekonomis. Manakala elit-elit yang menjadi lokomotif telah mencapai stasiun kekuasaan, rakyat Papua ditinggalkan dan janji-janji yang pernah disampaikan diabaikan. Akhirnya rakyat Papua yang dulu berkonflik sulit untuk dapat rujuk kembali, malahan menunggu bom waktu untuk meledak pada saatnya nanti misalnya sewaktu pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, pemilihan presiden; bahkan juga pada level pengangkatan kepala-kepala dinas dan jajaran kasubdin baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Arogansi kekuasaan melahirkan keterpecahan di tengah rakyat yang memendam dendam untuk pembalasan kelak. Rakyat diperalat demi kepentingan kekuasaan dan *status quo* sejumlah elit.

Mencermati dinamika kekuasaan sejak zaman Belanda, hingga reformasi, ada kecenderungan kuat dari pihak penentu kebijakan, untuk membelokkan permasalahan, dengan mengalihkan substansi permasalahan kepada penyelesaian yang bersifat instan dan *lipstik*. Simbiosis-mutualisma semasa Belanda, memang menguntungkan Papua tetapi kepentingan Belanda lebih dominan justru untuk memperoleh lahan bagi koloni peranakan Belanda. Semasa UNTEA, kepentingan kekuasaan berpihak kepada ekspansi ideologis Amerika Serikat dan pihak kekuasaan Indonesia mendapat remah keuntungannya. Semasa PEPERA, demi kepentingan kekuasaan Jakarta, sistem penentuan pendapat berupa *one man one vote* dialihkan menjadi sistem perwakilan, musyawarah untuk mufakat. Demikian pula tuntutan rakyat Papua semasa Orde Baru hingga saat ini, selalu dijawab dengan stigmatisasi, pemekaran provinsi, pemberian jabatan, pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (OTSUS), pembagian dana OTSUS, pemekaran kabupaten/distrik dan kampung tentu disertai dengan pembagian jabatan pada tingkat-tingkat tersebut.

---

Jaya Barat dengan ibukota Manokwari. Pada 23 Agustus 2003 dilangsungkan pendeklarasian Provinsi Irian Jaya Tengah dengan ibukota Timika. Deklarasi ini memicu bentrokan di tengah rakyat Papua yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian material di antara yang pro dan kontra.



### *Keamanan: Tragedi yang Tak Terungkap Tuntas*

Keamanan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kekuasaan. Demi stabilitas kekuasaan, keamanan dijadikan lokomotif dan *main stream* penyelenggaraan pemerintahan. Embrio kebijakan keamanan di Papua berasal dari konsepsi antara kepentingan kekuasaan Jakarta dan ekspansi ideologis Amerika Serikat. Embrio ini kemudian lahir untuk memenangkan PEPERA melalui kebijakan pemerintahan Indonesia, Direktorat Sosial Politik dan Lembaga Operasi Khusus Irian Barat (OPSUS). Kebijakan ini pada mulanya diimplementasikan oleh Komando Mandala dengan menyelenggarakan sejumlah kegiatan infiltrasi dan penyerbuan.<sup>15</sup> Setelah Komando Militer Irian Jaya (Kodam) XVII terbentuk dilanjutkan dengan sejumlah operasi militer.<sup>16</sup> Operasi militer menggunakan doktrin binomial militer yakni stabilitas dan pembangunan. Unsur yang menyertai stabilitas ialah keamanan, dan karena itu militer dikerahkan untuk mengamankan Papua agar pembangunan dapat berlangsung dengan lancar. Dari sisi rakyat Papua, kebijakan ini menyebabkan rakyat yang sudah terpolarisasi melalui kubu anti integrasi (pro Papua Merdeka) dan anti merdeka (Pro Indonesia) menjadi semakin tajam dan mengarah ke bentrok fisik langsung. Militer pasti merangkul kelompok pro Indonesia. Konflik antara dua kubu ini bukan lagi hanya bersifat laten, jargon-jargon dan diplomasi politis, tetapi sudah tereksplisitasi melalui tindakan-tindakan anarkis yang saling menghancurkan dan saling mengabaikan satu terhadap yang lain.

Pembangunan dengan pendekatan keamanan ini pada satu sisi bersifat destruktif, sungguh-sungguh destruktif, karena yang dihancurkan bukan saja hal yang bersifat aksidental atau material tetapi terutama hal yang substansial, yakni cara berpikir dan tata nilai. Militer berusaha secara sistematis dan terencana untuk memberantas komponen-komponen rakyat Papua yang memiliki perspektif berpikir politis berbeda. Kebebasan rakyat Papua dalam menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat pemegang kekuasaan, dihadapi dengan stigma separatis dan kekerasan senjata. Rakyat tak berdaya dan mengikuti saja keinginan pemegang

---

<sup>15</sup> Komando Mandala bermarkas di Makasar dan *front line* untuk infiltrasi dan penyerbuan Papua berpusat di Amahai dan Letfuan, Ambon. Komando ini mengadakan 3 kali kegiatan infiltrasi dan 5 kali operasi penyerbuan. (Pigay, 2001: 223-234).

<sup>16</sup> Sandi operasi berbeda dari masing-masing PANGDAM, namun isinya hampir sama, yakni menghancurkan kekuatan laten dan terbuka (OPM) dan memenangkan PEPERA. Strategi operasi melalui kegiatan intelejin, merangkul kepala-kepala suku, menangkap pimpinan OPM, mengusut orang-orang yang menolak integrasi, melakukan serangan bersenjata ke basis-basis kekuatan OPM (Djopari, 1995: 154-160; Pigay, 2001: 264-272)

kekuasaan dan pemilik senjata. Tata nilai rakyat setempat, mengalami kehancuran manakala pembangunan tidak memperhitungkan kultur setempat yang berkaitan dengan kosmos (lingkungan alam) dan sesama. Rakyat terpasung oleh didigdayaan kekuasaan dan tenggelam dalam nilai-nilai baru yang dipaksakan tanpa filter. Rakyat kehilangan identitas asalnya.

Pada sisi lain pendekatan bimonial menciptakan politik adu domba *divide et impera* di antara rakyat. Mereka yang mendukung dirangkul dengan diberi jabatan (meski dengan kontrol yang ketat), ditugaskanbelajarkan, di tingkat basis diberi barang-barang konsumtif (beras, makanan kaleng, pakaian, tape, radio). Mereka yang menolak ditangkapi, diinterogasi, diintimidasi, diteror, mengalami pelecehan seksual dan kekerasan fisik bahkan dibunuh. Dampak negatifnya, terjadi kecurigaan di antara rakyat Papua, mereka takut keluar rumah untuk melakukan kegiatan harian, terjadi arus pengungsian besar-besaran ke PNG, terjadi penjarahan terhadap harta milik rakyat dan lain sebagainya. Kekerasan di tanah Papua menimbulkan korban berjatuh di kalangan rakyat yang tidak berdosa. Data pasti tentang korban di kalangan rakyat sulit ditemukan. Tetapi adanya sejumlah operasi militer entah pada masa sebelum PEPERA dalam bentuk infiltrasi, entah pada masa PEPERA demi kemenangan Indonesia, entah pada masa Orde Baru maupun masa reformasi, tentu tidak sedikit korban.<sup>17</sup> Wartawan Peter Hastings menyebut korban rakyat Papua selama masa UNTEA sekitar 2.000-3.000, orang, Gubernur E. Bonay menyebut 30.000 orang dibunuh tentara Indonesia (Osborne, 1985: 50), belum terhitung korban ternak dan hasil kebun, cacat dan trauma.<sup>18</sup> Meski tidak ada data, namun ingatan

---

<sup>17</sup> Catatan tentang kegiatan militer di Papua yang berdampak pada korban di pihak rakyat Papua, dapat disebutkan melalui operasi-operasi pada tahun 1963 – 1969: Sadar, Bharatayudha, Wibawa. Pada 1977–1982 operasi: Jayawijaya, Sapu Bersih I dan II, Galang I dan II, Tumpas, Sapu Bersih III. Kasus-kasus pelanggaran HAM oleh tentara di Biak (1998), Abepura (1998), Abepura (2000), Wamena (2000), Merauke (2000), pembunuhan Theys (2001), Wasior (2001), Wamena (2003), Timika (2003), Abepura (2006).

<sup>18</sup> Informasi tentang jumlah korban selama masa UNTEA hanya sedikit sekali yang terungkap. lih. Pigay, 2001: 217–285 dan Osborne 1985: 40-76. Pengakuan pihak militer tentang korban di kalangan rakyat Papua hanya terungkap melalui mulut Acub Zainal. "Perlu dicatat di sini bahwa penumpasan OPM yang menelan korban di pihak rakyat lewat Operasi Pamungkas, memang telah menjadi catatan tersendiri untuk rakyat Irian yang sebagian keluarganya mungkin menjadi korban, terluka atau menjadi traumatik". (Lih. Pigay, 2001: 270). Perlakuan pejabat dan tentara Indonesia di Papua terhadap rakyat Papua yang menyebabkan kebencian terhadap kekuasaan Indonesia dapat dilihat juga pada Djopari, 1995: 82-85; Pigay, 2001: 343-350. SKP Jayapura mempunyai data yang cukup lengkap tentang korban di kalangan rakyat Papua selama masa PEPERA hingga 2005 melalui seri "Memoria Pasionis" dan juga laporan-laporan lainnya dari SKP-Jayapura yang tidak dipublikasikan. ELS-HAM Papua mencatat

penderitaan (*memoria passionis*) senantiasa terpatri dalam benak rakyat dan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menjadi ingatan kolektif rakyat Papua. Tidak jarang terdengar ceritera "di danau ini sekelompok kaum muda ditembak dan ditenggelamkan", "di pohon sana bapak saya dengan beberapa orang digantung", "di sungai ini kakak saya dengan banyak orang berkoteka diceburkan hidup-hidup dan mati kedinginan", "di gedung itu..., mama 'anu' dengan beberapa orang disekap", "di markas itu, para pemrotes PEPERA ditahan dan tidak pernah kembali", di kali ini..., kakak perempuan saya diperkosa", "waktu pasukan 'anu' bertugas di sana ada sejumlah pemuda sampai sekarang tidak diketahui berada di mana", dan banyak narasi lainnya. Kisah ingatan penderitaan tersebut diwariskan turun-temurun melalui tuturan, mengungkapkan bahwa sebagian rakyat Papua semasa hidup tidak mengalami kedamaian dan kematiannya tidak meninggalkan jejak. Kalaupun diketemukan pusara, pusara itupun tak diketahui siapa pemiliknya karena bernama. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi terhadap rakyat Papua oleh militer tak pernah tuntas diselesaikan.

Pengalaman-pengalaman rakyat Papua menghadapi kekerasan dan pembunuhan pihak militer menyebabkan rakyat Papua berkesimpulan bahwa di bawah kekuasaan Indonesia dengan regim militer yang destruktif, "kami tidak diperlakukan sebagai manusia dan dihormati sebagai makhluk yang semartabat. Kami terus menjadi korban baik dalam bentuk fisik maupun mental oleh segala macam jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pihak keamanan." Rakyat Papua selalu dicurigai sebagai anggota separatis dan pendukung Papua Merdeka. Kehadiran pihak keamanan di Papua ternyata lebih banyak menciptakan ketidaknyamanan di kalangan rakyat Papua. Inilah ingatan yang senantiasa ada dalam benak rakyat Papua yang secara langsung mengalami tindakan kekerasan fisik dan teror mental.

Etno-nasionalisme Papua dengan idiologi *one people one soul* untuk Papua Merdeka, yang digelindingkan oleh sekelompok elit lokal Papua, bukan hanya sekedar wacana tetapi sudah tereksplotasi melalui tindakan. Tindakan tersebut menyata melalui perekrutan kaum muda militan ke dalam basis militer seperti TPN, TAPENAL, TEPENAL,<sup>19</sup> gerilya kota dan gerakan bawah tanah membangun jaringan antara elit Papua dalam birokrat Indonesia asal Papua yang bersimpati pada gerakan OPM, pembelotan polisi dan tentara Indonesia asal Papua dengan senjata lengkap, serangan

---

korban pelanggaran HAM dari tahun 1968–1988 sebagai berikut: 1396 orang dibunuh, 23 orang hilang, 150 orang ditahan dengan alasan yang kurang jelas, 41 orang dianaya, 111 perempuan diperkosa dan terjadi 121 pembakaran kampung/rumah/gereja. (Raweyai, 2002: 57).

<sup>19</sup> Ketiga akronim tersebut merujuk pada: Tentara Pembebasan Nasional.



terhadap markas-markas tentara dan pos-pos keamanan di daerah-daerah terpencil. Teror kekerasan pun tak terkecuali datang dari pihak OPM terhadap rakyat Papua dalam bentuk intimidasi terhadap mereka yang dicurigai sebagai antek-antek tentara Indonesia, penyanderaan, penggiringan massa rakyat untuk mengadakan pengungsian besar-besaran ke PNG.<sup>20</sup> Meskipun kelompok ini kalah dalam peralatan dan personel tetapi mereka berhasil menanamkan ideologi Papua Merdeka ke dalam mayoritas rakyat Papua antara lain karena faktor *memoria passionis*.

Dari segi keamanan, rakyat Papua berada pada dua kutub kekuatan yang berseberangan, yakni tentara Indonesia dan OPM. Hal itu secara psikologis berdampak pada kehidupan sehari-hari. Rakyat tidak bisa menyatakan sikap netral ketika berhadapan langsung dengan dua kekuatan ini. Yang dapat dilakukan oleh rakyat adalah menjadi pribadi yang tidak pasti guna menjamin rasa aman. Berhadapan dengan kekuasaan Indonesia dengan regim militernya mereka dapat saja mengakui 100% "merah-putih", berhadapan dengan OPM mereka juga mengakui 100% "bintang kejora". Praktek kekerasan yang diperlihatkan oleh kekuatan bersenjata entah tentara Indonesia atau pun OPM telah membuat rakyat Papua merasa "kehilangan dirinya". Bersikap demi amannya membuat ungkapan kesejatan sebagai manusia yang bebas dan bermartabat tidak murni, tetapi ditopengi oleh kepura-puraan karena takut akan dampak yang dialami nanti. Tindakan kekuatan bersenjata terhadap rakyat Papua telah membuat rakyat takut mengungkapkan jati dirinya. Dengan kata lain tindakan tersebut membuat rakyat Papua merasa tidak lagi sebagai manusia Papua.

### ***HIV-AIDS: Ancaman akan Punahnya Suatu Bangsa***

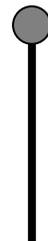
Kasus HIV/AIDS di tanah Papua pertama ditemukan di Merauke pada tahun 1992, dari salah seorang nelayan Thailand.<sup>21</sup> Data dinas kesehatan provinsi Papua menunjukkan per 30 Juni 2007, jumlah penderita HIV/AIDS di Papua sebanyak 3.377 kasus.<sup>22</sup> Secara nasional, berdasarkan

---

<sup>20</sup> Mengenai sepak terjang OPM, lihat Osborne, 1985: 40 – 77; Djopari, 1995: 109-115; Pigay, 2001: 339.

<sup>21</sup> Catatan mengenai tempat (Merauke) dan tahun (1992) tidak membuktikan bahwa kasus tersebut pertama sekali terjadi di Merauke pada tahun 1992. Juga tidak boleh dikatakan bahwa HIV/AIDS di Papua mulai menyebar dari Merauke. Sebab sulit untuk menunjuk secara pasti fakta peristiwanya.

<sup>22</sup> Data HIV-AIDS Papua diolah dari Subdin BPP & PL. Dinkes Provinsi Papua, Juli 2007. Bertambahnya angka penderita HIV/AIDS dalam data, dapat disebabkan baik oleh bertambahnya penderita baru maupun oleh temuan kasus penderita lama yang belum terdata



jumlah kasus, provinsi Papua menduduki urutan 2 setelah DKI Jakarta, namun berdasarkan prevalensi, provinsi Papua menduduki ranking I tingkat nasional yakni 2,8 % dari jumlah penduduk Papua (2.469.785 jiwa).<sup>23</sup> Artinya 28 orang dari 1.000 penduduk Papua terkena virus HIV/AIDS. Jika menggunakan fenomena gunung es dengan hipotesa bahwa data yang ditemukan hanya merupakan 10% dari kasus yang ada (muncul kepermukaan) maka dapat diperkirakan bahwa 280 orang dari 1.000 (€ 28 dari 100) penduduk Papua terkena virus HIV/AIDS. Berdasarkan data ini, akan didiskusikan dua hal, yakni bagaimana mewabahnya virus ini di tanah Papua dan manakah dampak penyebaran virus ini bagi rakyat Papua.

Kasus epidemi virus HIV/AIDS Papua mempunyai korelasi yang erat sekali dengan perilaku seks, yakni kebiasaan berganti-ganti pasangan seks atau berhubungan seks dengan orang yang suka berganti-ganti pasangan seks. Data dari Dinas Kesehatan provinsi Papua menunjukkan penyebab epidemi virus HIV/AIDS karena hubungan seks sebanyak 95,4% (heteroseks 94,3% dan homoseks 1.1%) dan ini dilakukan oleh pasangan yang berusia aproduktif (15-59 tahun).<sup>24</sup> Perilaku seks yang tidak bertanggungjawab mencerminkan lunturnya nilai-nilai religius satu komunitas dan renggangnya kontrol sosial dalam hidup bersama. Hubungan seks sebagai hal yang sakral, dalam perspektif religiusitas rakyat ditempatkan dalam institusi perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial dasar yang membentuk masyarakat. Maka hubungan seks yang wajar dan diakui oleh masyarakat adalah hubungan yang dilakukan oleh suami-istri dalam hidup perkawinan, sehingga anak yang lahir merupakan generasi sah pewaris budaya. Kontrol sosial terhadap pelanggaran atas perilaku seksual yang tidak bertanggungjawab ditandai dengan sanksi adat yang berat terhadap pelaku. Perilaku seks yang tidak wajar merusak tatanan hidup bersama dalam masyarakat.

Penelusuran tentang rusaknya tata nilai hidup bersama dalam masyarakat karena perilaku seks yang tidak bertanggungjawab bisa ditelaah melalui dua hal yakni, kuatnya pengaruh dari luar dan rapuhnya pertahanan dari dalam rakyat Papua. Desakan pengaruh dari luar dengan budaya sekular dan konsumeristiknya yang menawarkan nilai instan tak mampu dihadapi oleh rakyat Papua yang memiliki sikap pragmatis dan akomodatif. Budaya

---

<sup>23</sup> Penyakit yang paling banyak diderita penduduk Papua adalah malaria 16%. namun malaria dapat disembuhkan. Adapun HIV/AIDS, sekali seseorang terinfeksi virus tersebut, vonis kematian sudah jelas di depan mata.

<sup>24</sup> Berdasarkan kelompok umur, prosentase tertinggi yakni 89% (3.055 kasus) ada pada usia produktif (15-59 tahun). Di antara usia produktif prosentase tertinggi pada kelompok umur 20-39 tahun sebanyak 78% (2.342 kasus).



sekuler-konsumeristik menempatkan hubungan seks sebagai tindakan *remedium concupiscentiae* dan karena itu dapat dibeli tanpa konsekuensi langsung bagi pelakunya. Selanjutnya bertumbuhnya bisnis seks entah yang di jalanan kota, di lokalisasi-lokalisasi maupun di kampung-kampung dengan transaksi dalam bentuk uang atau juga kayu gaharu, mempermudah akses rakyat terhadap bisnis tersebut.<sup>25</sup> Sikap pragmatis dan akomodatif memungkinkan rakyat menerima apa saja yang datang dari luar tanpa filter dan sikap kritis. Manakala yang disajikan adalah seks, terjadilah transaksi tanpa memperhitungkan bahaya besar yang tersembunyi dan perlahan-lahan menghancurkan hidup bersama.<sup>26</sup>

Di balik mewabahnya virus HIV/AIDS, berlangsunglah suatu proses penghancuran terhadap satu komunitas. Prosentasi tinggi pada kaum muda dan pasangan usia subur, mengindikasikan bahwa kehancuran terhadap suatu komunitas merupakan hal yang sungguh nyata di depan mata. Kaum muda yang terkena virus kemudian menikah akan melahirkan generasi-generasi yang sudah terinfeksi. Demikian juga pasangan usia subur yang sudah terjangkit virus, jika hendak melanjutkan keturunan secara kodrati, akan menurunkan generasi yang akan datang lengkap dengan HIV/AIDSnya. Andaikan tidak ada lagi yang mau menikah dan tidak ada lagi yang melahirkan, maka tidak akan ada angkatan berikut yang menjadi penghuni jagat Papua ini, atau sekurang-kurangnya satu generasi akan hilang. Analisis ini mungkin berlebih-lebihan dan mengada-ada, tetapi satu hal yang pasti bahwa epidemi virus ini memberi satu kepastian, bahwa kematian sungguh nyata, jika tidak ada cara mengatasinya dan obat untuk menyembuhkannya.

Kehancuran komunitas ini bersifat substansial dan aksidental secara serentak. Nilai dan perwujudan (eksploitasi) dari nilai-nilai berupa hasil-hasil budaya dimusnahkan. Nilai-nilai religius yang menjadi pegangan dalam hidup bersama, yang diungkapkan dalam tabu terhadap hubungan seks di luar perkawinan dilanggar. Aturan yang menopang tegaknya hidup bersama keluarga dalam komunitas kehilangan daya dukungnya, keberlangsungan

---

<sup>25</sup> Menurut laporan SKP Jayapura, beberapa tempat di kabupaten Asmat, juga di Asue, kabupaten Merauke, ditemukan sejumlah *rumah papan* yang dihuni oleh beberapa perempuan berkulit terang dan berambut lurus yang mengadakan transaksi seks dengan pembayaran dalam bentuk kayu gaharu. Mereka *diback-up* oleh sejumlah pihak yang bersenjata.

<sup>26</sup> Dalam pembicaraan penulis dengan salah seorang pastor dari Agats, dikisahkan peristiwa ini. Pastor bertanya kepada pemuda pelanggan 'rumah papan', "Apa yang menarik di sana?" yang dijawab oleh pemuda itu, "Ah.. pater, kami mau lihat itu paha putih".



suatu komunitas yang ditata dalam perkawinan yang sah untuk melahirkan keturunan yang legal (demi keberlangsungan fam, pemeliharaan harta warisan, penguasaan hak ulayat, dan sebagainya) tidak digubris lagi. Misalnya, peraturan pergaulan bersama menjadi luntur dan perlahan-lahan kehilangan maknanya. Pergaulan bebas dan hubungan seks di luar perkawinan bukan lagi menjadi hal tabu, tetapi dipraktekkan secara vulgar dan dikisahkan secara lugas. Perkat hidup bersama dengan jalan memelihara nilai yang diakui bersama semakin lemah. Hakekat hidup bersama dengan melindungi perkawinan yang sah demi lahirnya generasi yang legal tidak terjamin. Lama kelamaan satu komunitas akan musnah. Dengan kata lain, jika epidemi HIV/AIDS mewabah pada kalangan rakyat Papua usia produktif, maka perlahan-lahan rakyat akan musnah bersama dengan nilai-nilai yang mendasari hidup rakyat. Data memang tidak membuat pengkategorian berdasarkan etnis Papua non Papua, namun mencermati sikap pragmatis dan akomodatif rakyat Papua, ancaman akan kepunahan etnis Papua patut diperhitungkan sebagai bahaya yang nyata.

Sampai di sini kita telah bersama-sama mendiskusikan realitas rakyat Papua, disorot dari empat perspektif yakni kemiskinan, kekuasaan, keamanan dan kesehatan. Keempat perspektif ini diangkat sebagai pengalaman rakyat. Terminologi lain untuk menamai keempat pengalaman ini yaitu ketidakadilan, penindasan, pembunuhan dan kematian. Inilah pengalaman dasariah mayoritas rakyat Papua, bahwa mereka hidup miskin karena mengalami ketidakadilan, tertekan karena mengalami penindasan, trauma karena berada dalam bayangan narasi pembunuhan masa lalu (yang mendatangkan rasa takut akan dibunuh) dan ketakberdayaan menghadapi kematian yang pasti. Langkah berikut adalah membicarakan bersama pengalaman rakyat Papua dari perspektif iman kristiani.

Pertanyaan utama dalam percakapan selanjutnya adalah manakah pengalaman Yesus yang dapat dijadikan titik gravitasi untuk mendiskusikan realitas rakyat Papua tersebut di atas dari segi iman? Fokus yang ditawarkan, hendaknya sungguh saling menyingkapkan satu terhadap yang lain. Pengalaman rakyat Papua dapat menerangkan pengalaman Yesus dan sebaliknya pengalaman Yesus dapat menerangkan pengalaman rakyat Papua. Terdapat kesejajaran antara pengalaman rakyat dengan pengalaman Yesus. Kesejajaran dua pengalaman tersebut menjadi *meeting point* yang dapat membantu kita melihat utopia keselamatan, merefleksikan secara teologis keselamatan kristiani rakyat Papua saat ini.

Rujukan untuk menemukan pengalaman Yesus, bersumber pada tradisi yudeo-kristiani sebagai mana tersurat dalam Kitab Suci Perjanjian Baru, teristimewa keempat Injil. Keempat Injil inilah yang melukiskan



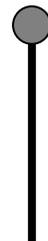
sejarah hidup Yesus di tengah rakyat Palestina.<sup>27</sup> Semua pengalaman Yesus dapat disandingkan dengan pengalaman rakyat Papua. Kita dapat bersumber pada pengalaman masa kanak-kanak Yesus, yang mengalami penolakan oleh Yusuf sejak dalam kandungan Maria, kelahirannya yang terjadi di tempat yang tidak sewajarnya, pelarian-Nya ke Mesir untuk menyelamatkan diri dari nafsu kuasa Herodes. Pencobaan di padang gurun dengan tiga tawaran berupa kekayaan, kekuasaan dan nama besar dapat juga menjadi fokus perbandingan, atau juga teks-teks lainnya.

Dalam artikel ini percakapan tentang pengalaman Yesus yang mau disandingkan dengan pengalaman rakyat Papua adalah pengalaman penderitaan Yesus dalam narasi kisah Sengara Yesus dari taman Getsemani sampai ke puncak Golgota. Pilihan atas narasi kisah Sengara Yesus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sengara dan kematian Yesus bukan karena kehendak Yesus, artinya Yesus sendiri tidak pernah memikirkan penderitaan tragis yang berakhir dengan kematian di salib. Penderitaan Yesus merupakan hasil tindakan sejarah. Lagi pula mati di kayu salib, bukanlah kematian yang bersifat kodrati, mati karena ajal, tetapi mati karena diciptakan oleh sejarah melalui perangkat hukum yang dalam kisah Yesus terlihat intervensi manusia sangat tinggi dari Getsemani sampai Golgota. Narasi kisah sengsara Yesus sejajar dengan pengalaman penderitaan rakyat Papua. Penderitaan rakyat Papua bukan karena kodratnya atau kesalahannya, tetapi terlebih karena tindakan manusia yang memiliki kuasa, senjata dan uang. Rakyat Papua dikorbankan oleh hegemoni ideologi-ekonomi asing (Amerika dan Belanda) dan gengsi politik Indonesia.
2. Penderitaan yang dialami oleh Yesus, bukanlah kisah tunggal dalam satu babak. Penderitaan Yesus merupakan peristiwa yang terkait satu dengan lain dalam banyak babak, yang melibatkan banyak pelaku dengan berbagai kepentingannya. Kolaborasi antara pelaku-pelaku yang berkepentingan mewarnai alur-alur kisah sengsara Yesus dalam babak-babak penderitaan yang berakhir pada salib. Keterkaitan antara pelaku

---

<sup>27</sup> Palestina pada waktu itu berada dalam imperium Romawi. Rakyat dibelenggu oleh aristokrasi politik (Pilatus, Herodes, dan serdadu Romawi) melalui pembayaran pajak, penempatan serdadu Romawi yang mengenakan kalung patung dada kaisar untuk mengawal benteng Antonia di Yerusalem dan mengawasi kaum nasionalis Yahudi. Terhadap aristokrasi agama Yahudi (imam agung, Sanhedrin, ahli Taurat dan kaum Farisi) kekaisaran Romawi mempertahankan otonomi khusus dalam masalah-masalah keagamaan. Aturan keagamaan Yahudi dalam praktek memberatkan rakyat biasa. Akibatnya, kalangan rakyat biasa memikul beban ganda, yakni beban dari imperium Romawi dan aristokrasi agama Yahudi (Stambaugh, 1997:13-20).



dan peristiwa (waktu) dalam kisah Yesus dapat menjadi gambaran figuratif akan penderitaan rakyat Papua yang diperlakukan tidak wajar dari waktu ke waktu oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Rakyat Papua menjadi korban kolaborasi sejumlah pihak secara simultan sejak zaman Belanda hingga Otonomi Khusus.

3. Alasan idiologis kematian Yesus, adalah klaim Yesus atas dirinya sebagai "Putra Allah", sebagai Mesias, raja yang dijanjikan. Klaim ini menyebabkan kemarahan para aristokrat agama (sosio-religius), karena merupakan bentuk penghormatan terhadap Allah, menurut kepercayaan Yahudi. Sendi-sendi religius institusional Yahudi dirongrong keabsahannya oleh Yesus. Hal ini menimbulkan krisis kewibawaan di kalangan para pemimpin Yahudi dan menciptakan instabilitas hidup sosio-religius Yahudi. Pengalaman rakyat Papua yang mempertanyakan kebenaran sejarah masa lalu tentang status mereka, menimbulkan krisis politik pemerintahan Indonesia dari waktu ke waktu yang penyelesaiannya ditempuh melalui pendekatan militer dan politik. Persoalan pelurusan sejarah masa lalu untuk menemukan kebenaran yang sejati akan status Papua menimbulkan sikap kontra dialog dan suasana teror terhadap sejumlah komponen rakyat Papua. Pengalaman kolektif rakyat Papua ini dapat disejajarkan dengan klaim Yesus tentang diri-Nya yang dihadapi dengan kekerasan oleh aristokrasi politik dan agama.

Tidak semua teks kisah Sengara Yesus dari keempat Injil dipilih. Kisah sengsara yang akan didiskusikan adalah Injil keempat, kisah yang selalu didengar oleh umat katolik Roma sedunia pada hari Jumat Agung. Kisah ini diangkat dengan pertimbangan bahwa setiap hari Jumat Agung, dalam perayaan wafatnya Yesus, hendaknya juga mengingatkan pengikut Kristus, terutama warga Gereja Katolik Roma di Papua, bahwa peristiwa kematian Yesus merupakan peristiwa yang selalu terulang sepanjang masa oleh para pengikut-Nya, yang pada saat ini dialami oleh rakyat Papua.<sup>28</sup>

### **Soteriologi Penderitaan Rakyat Papua**

Penderitaan rakyat Papua adalah fakta, ada dan nyata, demikian juga penderitaan Yesus dalam kisah sengsara merupakan peristiwa yang sungguh terjadi. Diskusi selanjutnya bukan pada bobot kebenaran dan dramatisasi

---

<sup>28</sup> Para uskup sedunia dalam Konsili Vatikan II tahun 1963 menyatakan bahwa "Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga" (GS: 1).



akan penderitaan baik rakyat Papua maupun Yesus, tetapi pada nilai penderitaan tersebut. Maka fokus diskusi pada bagian ini adalah apakah kesejajaran antara narasi Kisah Sengsara Yesus dengan Penderitaan Rakyat Papua mengungkapkan dan mewakili keselamatan umat manusia secara menyeluruh? Manakah keselamatan yang ditawarkan oleh rakyat Papua bagi dunia? Bagaimana keselamatan rakyat Papua menjadi titik pusat evangelisasi Gereja? Dimensi ontologis dari penderitaan akan direfleksikan dalam perspektif kristiani sehingga berdimensi soteriologis. Pada akhirnya refleksi ini akan menempatkan kita semua ke dalam tugas panggilan Gereja masa kini bagi rakyat Papua, bernuansa evangelisasi sehingga berdimensi misiologis. Tugas itu diemban oleh Gereja, artinya oleh semua orang yang dibaptis baik Katolik maupun Protestan mengingat tanah Papua mayoritas rakyatnya pengikut Kristus.

Ada 4 hal yang akan direfleksikan dalam diskusi kita selanjutnya, yakni: tempat penderitaan Yesus dalam sejarah keselamatan, derita Rakyat Papua dalam kisah sengsara Yesus, kematian Yesus dan duka rakyat Papua, Rakyat Papua yang menderita prinsip keselamatan universal.<sup>29</sup>

### **Tempat Penderitaan Yesus dalam Sejarah Keselamatan**

Sengsara dan penderitaan Yesus mendapat perhatian yang tinggi dalam liturgi Gereja Katolik. Kisah sengsara Yesus dalam Injil Sinoptik dibacakan pada perayaan Minggu Palma (minggu daun-daun) secara bergiliran tiap tahun dan Injil Yohanes pada hari Jumat Agung, perayaan wafat Yesus. Devosi sengsara Yesus dalam bentuk Jalan Salib juga diadakan pada setiap hari Jumat selama masa Prapaskah, yang berpuncak pada Jumat Agung. Devosi jalan salib juga dilakukan oleh setiap peziarah di tempat-tempat ziarah (Gua) Maria. Praktek liturgi Gereja dan devosi umat dapat menumbuhkan sikap asketis terhadap penderitaan Yesus dan fantasi emosional *solipsis*, kesalehan pribadi yang berlebihan (terutama dalam Jalan Salib) sehingga cenderung menghilangkan makna penderitaan Yesus dalam sejarah sekaligus menolak sejumlah nilai keselamatan dari penderitaan Yesus bagi umat manusia. Sikap asketis selanjutnya mengarah ke sikap moralis. Para peserta devosi Jalan Salib memandang iba akan penderitaan Yesus bahkan mungkin juga malu sehingga mempersalahkan diri lalu merumuskan suatu sikap "harus" pada dirinya sendiri sebagai silih atas kesalahannya. Penderitaan Yesus tidak ditempatkan secara tepat dalam sejarah keselamatan.

---

<sup>29</sup> Refleksi ini mengikuti alur pikiran Ellacuria, 1993: 543-563; 1993<sup>1</sup>: 580-603; 1993<sup>2</sup>: 251-288; dan 1993<sup>3</sup>: 288-327.



Pembobotan terhadap penderitaan Yesus yang bermakna keselamatan perlu ditempatkan dalam pewartaan Yesus tentang Kerajaan Allah. Penderitaan merupakan dampak, yang tidak pernah direncanakan sebelumnya, dari "Kata" dan "Perbuatan" Yesus dalam mewartakan Kerajaan Allah. Peristiwa inkarnasi bukan tertuju kepada penderitaan dan kematian tetapi tertuju kepada Kerajaan Allah, keselamatan umat manusia. Jika penderitaan Yesus bukan merupakan rencana keselamatan tetapi merupakan dampak dari Kerajaan Allah, maka perlu ditelusuri manakah titik tolak yang memberi bobot pada penderitaan rakyat sehingga penderitaan bermakna keselamatan? Narasi Kisah Sengsara Yesus dalam Yohanes 18-19 melukiskan secara paradoksal bahwa penderitaan dan kematian Yesus di Salib sebagai fakta historis yang tak terbantahkan merupakan peninggian dan pemuliaan-Nya (Yoh. 3: 14; 8: 28; 12: 16, 32; 7: 39; 13: 31-32). Peninggian kemuliaan berarti dari penderitaan Yesus yang berpuncak pada kematian di Salib terpancarlah daya penyelamatan Allah, yang serentak daya penyelamatan Yesus Kristus. Dengan demikian melalui penderitaan dan kematian, hidup kekal dinyatakan dan ditawarkan kepada manusia (bdk. Groenen, 1994: 153).

Penderitaan Yesus dan kematian-Nya di Salib merupakan fakta historis, artinya sungguh-sungguh dialami Yesus, bukan sandiwara, bukan pula mitos. Tetapi kisah Injil Yoh 18-19 merupakan suatu kisah *post-factum* kebangkitan, maka lebih sebagai sebuah komentar Yohanes setelah kebangkitan Yesus tentang penderitaan dan kematian Yesus. Komentar itu bukan untuk meremehkan fakta historis kemanusiaan Yesus dalam penderitaan (manusia yang berdaging, berdarah sehingga merasakan sakitnya waktu disiksa), tetapi menginterpretasikan penderitaan dan kematian Yesus sebagai pewahyuan "kebenaran", yakni realitas ilahi yang secara dinamis menyata dalam eksistensi dan kematian Yesus. Kebenaran itu adalah bahwa pertama, eksistensi Yesus memuncak dalam kematian-Nya sebagai titik balik dalam sejarah umat manusia yakni peralihan dari kemalangan kepada kebahagiaan, dari kematian kepada kehidupan kekal, dari penderitaan kepada kemenangan. Dalam Injil Yohanes penderitaan dan kematian Yesus bukan merupakan korban penebusan. Kematian merupakan puncak yang berarti pemuliaan, karena Ia "sudah selesai" melaksanakan tugas-Nya.<sup>30</sup> Kedua, bahwa Allah sebagai realitas penyelamatan bagi manusia, suatu proses pendagingan "Yang Ilahi", di mana "Yang Ilahi" masuk ke dalam sejarah manusia, menjadi nyata dalam kata dan perbuatan. Penderitaan Yesus dalam sejarah sebagai titik pembuktian kemanusiaan

---

<sup>30</sup> Kisah Sengsara dalam Yoh 18-19 secara jelas menampilkan Yesus sebagai tokoh adi-manusiawi yang mengendalikan seluruh kejadian (Bdk. Groenen, 1994: 97-98).



Yesus dan kebangkitan-Nya merupakan bukti kebenaran (pembenaran) akan pewataan-Nya. Maka kebenaran tidak dipahami sebagai kebenaran intelektual yang berciri gnosis yang mengatakan kebenaran dan keselamatan manusia datang dari ilmu pengetahuan tetapi berciri aksiomatis yakni secara apriori dan intuitif bahwa kesetiaan sebagai sumber keselamatan merupakan kebenaran. Penderitaan sebagai tanda kesetiaan akan penyejaraan Allah yang bermakna keselamatan bagi manusia.

Jadi, titik fokus refleksi atas penderitaan dan kematian Yesus adalah kebangkitan. Yesus yang disalibkan bangkit. Dia menderita dan disalibkan karena hidup dan perjalanan-Nya menyatakan Kerajaan, memberi hidup baru sebagai kepenuhan Kerajaan Allah. Kebangkitan mengantar kita kepada refleksi tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus, sekaligus seluruh umat manusia. Baik penderitaan Yesus maupun penderitaan seluruh umat manusia perlu direfleksikan dari perspektif kebangkitan. Refleksi ini tidak bermaksud merohankan penderitaan dan membangun sikap pasrah menghadapi penderitaan, tetapi mendukung sikap profetis agar berjuang mengatasi penderitaan sebagai harapan akan keselamatan dan kebangkitan. Narasi Yoh 18-19 memperlihatkan situasi gawat yang dihadapi Yesus, baik dari wakil sistim sosio-politis (Pilatus) maupun sosio-religius (Hanas, Kayafas). Yesus ditampilkan sebagai model keberanian dan kesetiaan yang tegas dan tidak dapat dipermainkan. Penderitaan yang dialami Yesus dalam bentuk penistaan berupa kesaksian palsu, pembelokan persoalan dari masalah religius ke masalah politis kembali pada masalah religius, siksaan fisik berupa penderaan dan penyaliban, tidak menyurutkan langkah Yesus dalam membela kebenaran, yakni setia kepada Bapa dalam tindakan penyelamatan manusia. Itulah kemuliaan penderitaan. Kebangkitan merupakan pembuktian kebenaran atas penderitaan. Kebenaran yang merujuk pada permulaan hidup baru berasal dari usaha berjuang melawan kejahatan dan kematian. Kehidupan berasal dari kematian. Refleksi penderitaan Yesus akan membantu kita merefleksikan secara teologis penderitaan rakyat Papua.

### **Derita Rakyat Papua dalam Kisah Sengsara Yesus**

Sejarah keselamatan tidak bisa diabsolutkan hanya pada Yesus. Sejarah keselamatan perlu ditempatkan juga dalam pengalaman manusia dari waktu ke waktu. Mengabsolutkan sejarah keselamatan hanya pada Yesus mengantar kita pada sikap mengadili para pelaku kejahatan terhadap Yesus historis masa lalu dan menjadikannya sebagai peristiwa yang telah berlalu. Menempatkan sejarah keselamatan sebagai tindakan Allah yang menyelamatkan manusia dari waktu ke waktu membangkitkan kesadaran bahwa sejarah tentang kejahatan manusia yang satu terhadap yang lain,



dalam berbagai bentuk senantiasa berlangsung terus sehingga tindakan penyelamatan pun harus terus berlangsung dalam sejarah. Kesadaran ini memberi keyakinan untuk mengakui bahwa derita rakyat Papua masa kini merupakan kelanjutan dari kisah sengsara Yesus. Kelanjutan tidak sama dengan identifikasi. Identifikasi lebih bersifat mencari kesamaan antara dua atau lebih peristiwa yang berlangsung pada waktu dan tempat yang berbeda. Kelanjutan memberi tekanan pada makna dan arti permanen bahwa peristiwa yang terjadi pada suatu waktu merupakan titik letupan mewakili semua peristiwa yang berlangsung dalam sejarah dari dahulu sampai sekarang. Peristiwa yang dialami Yesus di Palestina merupakan riak yang pecah dari arus kejadian yang dialami oleh semua umat manusia di seluruh dunia.

Pembedahan derita rakyat Papua dalam kisah sengsara Yesus perlu ditempatkan dalam dinamika sejarah keselamatan Allah terhadap manusia. Sejarah keselamatan bukan suatu kepastian kodrati melainkan keyakinan akan campur tangan Allah dalam sejarah untuk menghancurkan penyebab penderitaan. Kesadaran akan campur tangan Allah menjadi kekuatan dari dalam (*inner-force*) bagi setiap rakyat Papua yang berada dalam penderitaan untuk mengatasinya. Kesadaran ini disebut iman. Diskusi selanjutnya pada perbincangan ini akan berpusat pada manakah letak iman kristiani dari penderitaan rakyat Papua dalam konteks penderitaan Yesus? Adakah unsur-unsur iman kristiani dalam penderitaan rakyat Papua?

Gambaran penderitaan rakyat Papua sebagaimana dipaparkan pada bagian pertama artikel ini menunjukkan bahwa penderitaan rakyat disebabkan oleh struktur sosial dan tindakan manusia yang diciptakan dalam sejarah. Struktur sosial yang diciptakan dan tindakan yang dilakukan manusia memperlihatkan penegasian terhadap campur tangan Allah dalam sejarah keselamatan. Suatu situasi penolakan akan pemenuhan kehadiran dan pemberian diri Allah dalam hidup manusia. Struktur sosial yang diciptakan menyebabkan penderitaan rakyat Papua bersifat sebagai obyek kekuasaan dosa. Tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam sejarah di Papua merupakan kekuatan yang melawan rakyat Papua sebagai kekuasaan yang melawan Allah. Penderitaan rakyat Papua dalam bentuk ketidakadilan dan kemiskinan, penindasan dan kekerasan militeristik pemerintahan yang otoriter, penyakit yang mematikan merupakan realitas yang memperlihatkan penolakan terhadap pemberian diri Allah dalam sejarah. Kekuasaan dosa mendatangkan penderitaan dan kematian.

Dosa, tidak dilihat pertama-tama secara moral berkaitan dengan dosa-dosa pribadi tetapi merupakan realitas kolektif, dosa sosial yang menghancurkan sejarah dan menghalangi kehadiran Allah ke dalam sejarah. Dosa sosial sebagai kejahatan yang sudah menggurita memasuki struktur

sosial sehingga struktur sosial menjadi struktur dosa.<sup>31</sup> Penderitaan yang dialami rakyat Papua bukan hanya merupakan akibat dari kumpulan tindakan-tindakan yang bersifat pribadi terhadap orang perorangan tetapi suatu tindakan kolektif yang didasarkan pada suatu ideologi yang bekerja melalui struktur yang sudah direkayasa dan sukar ditiadakan. Daya kerja ideologi yang sudah memasuki struktur dosa menyebabkan penderitaan dan penyaliban Yesus. Penderitaan dan penyaliban Yesus tidak hanya berakhir di Golgotha tetapi berlangsung terus sampai sekarang di tanah Papua dalam bentuk penyaliban terhadap rakyat Papua. Penyaliban rakyat Papua bukan hanya menyangkut pribadi orang perorang, bersifat individu tetapi terutama bersifat kolektif dan dilembagakan (bdk. Ellacuría, 1993<sup>1</sup>: 581-590).

Penyelamatan Allah berlangsung dalam sejarah melalui tindakan manusia sehingga tindakan manusia menjadi tindakan keselamatan. Sejarah manusia menjadi sejarah Allah yang menyelamatkan. Realitas rakyat Papua di samping memperlihatkan obyek dosa dan penegasian terhadap pemberian diri Allah juga dapat berfungsi sebagai obyek rahmat, sebagai sarana bagi kekuatan yang membangun hidup. Di mana rahmat dari pengalaman empiris rakyat Papua? Dari perspektif kisah sengsara Yesus (Yoh. 18-19), rahmat ada dalam rakyat Papua itu sendiri. Rakyat yang dimiskinkan, diperdaya, ditindas dan dibunuh. Mereka menjadi tempat keberpihakan dan belaskasih Allah. Rakyat Papua yang menderita merupakan tempat pewahyuan Allah. "Tangisan mayoritas manusia yang menderita dan terindas karena ditindas oleh minoritas arogan, merupakan tangisan Yesus dalam sejarah." (Ellacuría, 1993: 556)

Figur yang menderita dan disalibkan, figur itulah yang menyelamatkan. Figur tersalib menunjukkan bahwa Allah sendiri membuat diri-Nya hadir dalam penderitaan rakyat Papua, sehingga derita rakyat Papua menjadi prinsip tanda zaman yakni Allah yang hadir dalam sejarah mengambil rupa rakyat yang selalu menderita. Hal yang merupakan aib dan kebodohan dijadikan Allah sumber rahmat dan penyelamatan. Yang miskin mendapat janji bahagia, penindasan mengarah kepada pemuliaan, pendustaan mengarah kepada kebenaran, kematian mengarah kepada kebangkitan. Namun demikian rahmat baru merupakan daya implisit yang perlu dieksplicitkan melalui tindakan manusia, terutama Gereja (semua orang yang dibaptis) untuk membebaskan rakyat dari penderitaan mereka.

---

<sup>31</sup> Menurut Paus Yohanes Paulus II struktur dosa berakar dalam dosa pribadi berkaitan dengan tindakan-tindakan konkret yang membentuk struktur itu, memantapkannya, dan menjadikannya sukar ditiadakan. Akibatnya struktur tersebut makin kuat serta meluas, dan menjadi sumber dosa lain serta mempengaruhi perilaku orang per-orangan (Bdk SRS 36.2).

## Kematian Yesus dan Duka Rakyat Papua

Sejarah keselamatan Allah tidak tertuju kepada kematian. Demikian yang diperlihatkan oleh 'daging' sejarah Allah, yakni Yesus. Yesus menyejarahkan Allah melalui kata dan tindakan-Nya yang secara aktif mewartakan Kerajaan Allah. Alur intensitas dalam pewartaan-Nya bukan dengan menunggu untuk mati tetapi dengan memaklumkan Kerajaan karena Ia melihat alasan yang meyakinkan akan hadirnya kerajaan Allah. Ia tidak ragu-ragu serta mundur dalam konflik dengan kekuasaan sosio-politis dan sosio-religius yang menegasikan kehendak Allah dan menihilkan hasrat kehadiran Allah di dunia. Penegasian nyata melalui penyaliban dan kematian Yesus.

Kematian Yesus tidak akan membatalkan datangnya keselamatan bagi umat manusia. Kematian Yesus tidak dapat memenjarakan-Nya dalam kematian kekal. Karena itu kematian Yesus tidak memisahkan hubungan antara keselamatan eskaton yang akan datang dengan keselamatan kini dan di sini yang dinyatakan melalui penyertaan-Nya kepada umat. Buah keselamatan tidak dapat dijadikan eksklusif hanya sebagai buah-buah mistik kematian Yesus yang terpisah dari kehidupan real. Keselamatan bukanlah sesuatu yang pasif dan penerimaan kodrat ketaatan dari nasib dengan membiarkan nasib sendiri ditentukan oleh Allah. Konsekuensinya bahwa kematian Yesus bukanlah akhir dari kepenuhan hidup-Nya tetapi akhir dari pola yang harus diulangi dan diikuti dalam hidup baru dengan harapan akan kebangkitan. Kematian Yesus merupakan akhir yang penuh arti dari hidup-Nya karena kematiannya mengantar kepada hidup sebagaimana diperlihatkan kepada kita dalam sejarah dan arti teologis dari kehidupannya. Jadi hidup-Nya mempersiapkan kepenuhan arti kematian, dan sebagai akibat dari kematian-Nya, pertama-tama hidup baru diterima, karena Ia telah memberikan hidup-Nya.

Yesus tidak terpenjara dalam kematian kekal, tetapi kematian Yesus senantiasa terulang dalam sejarah umat manusia berlangsung terus. Kematian Yesus berlanjut dalam kematian rakyat Papua. Substansi kesamaan corak kematian Yesus dan kematian rakyat Papua ialah keduanya menunjukkan keadaan terpaksa dalam sejarah. Mereka dieksekusi sebelum ajal menjemput secara alami (kodrati). Kematian karena keadaan terpaksa membenarkan prinsip kenabian yang secara prefiguratif dikatakan: "Mesias harus menderita semuanya itu supaya masuk ke dalam kemuliaan-Nya" (Luk. 24: 26). Resistensi terhadap kekuatan yang bersifat menindas melalui perjuangan untuk pembebasan menyebabkan para nabi dianiaya dan mati. Yang terjadi pada Yesus demikian juga terjadi pada rakyat Papua. Perjuangan untuk mengatasi kemiskinan dan penindasan di tanah Papua menyebabkan rakyat Papua dianiaya, mati ataupun hilang. Namun demikian resistensi rakyat Papua bukan merupakan tujuan tetapi sebagai konsekuensi

dari sejarah hidup mereka, reaksi terhadap cita-cita kesejahteraan, pengakuan, perdamaian, hidup yang dinegasikan oleh struktur dosa. Dari pengalaman sejarah keselamatan membuktikan bahwa hadirnya kemuliaan Allah terkondisi melalui jalan penderitaan dan kematian.

Mendiskusikan kematian terpaksa dari Yesus, perlu memperhatikan alasan yang bersifat historis dari kematiannya. Meskipun Yoh 18-19 bukan kisah sejarah, tetapi nilai sejarah dalam kisah itu sungguh terjadi. Dalam situasi yang dikendalikan oleh kekuatan sosio-politis dan sosio-religius, melalui dialog pengadilan diketahui bahwa Yesus dipandang sebagai orang yang membalikkan struktur sosial, agitator politik (sosio-politik), menghina Tuhan dan merusak tradisi agama (sosio-religius). Hal mana mengantar-Nya pada salib dan kematian. Tetapi kematian-Nya serentak merupakan pemuliaan-Nya, melalui kematian menuju kemuliaan namun kemuliaan tidak diikuti oleh kematian. Kematian Yesus bukan untuk menebus dosa manusia, tetapi untuk menunjukkan hadir-Nya kemuliaan Allah. Dengan memperhatikan alasan sejarah kematian Yesus, soteriologi terhadap penderitaan rakyat Papua akan berujung pada pemikiran bahwa Papua Baru merupakan antesis dari penderitaan. Penderitaan bukannya tumbal tetapi merupakan kemenangan dari keyakinan atas kebenaran yang dihayati. Realitas empiris rakyat Papua sungguh menunjukkan penderitaan, tetapi realitas empiris ini tidak boleh mematikan harapan akan Papua Baru yang berkeadilan, bermartabat, bersaudara dan berkehidupan. Papua Baru yang dapat menunjukkan solidaritas kemanusiaan universal dan selebrasi persaudaraan yang sejati.

Papua Baru bukan bersifat eskaton tetapi kini dan di sini yang dapat menunjukkan penyejarahan Allah di dunia. Papua yang menciptakan tata ekonomi baru yang mengutamakan keadilan dan kesejateraan melalui pengaturan ekonomi yang berpihak dan secara langsung ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan yang terjamin pada rakyat Papua dan semua manusia. Papua Baru membangun tata sosial baru yang memungkinkan rakyat untuk menjadi agen pembaharu bagi nasib mereka sendiri. Rakyat memiliki peluang yang lebih besar bagi kreatifitas dan keterlibatannya. Tata sosial baru memberi ruang gerak yang lebih kepada pribadi dan keputusan bersama bagi usaha-usaha sosial sehingga setiap orang bukan hanya diterima sebagai individu tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Hal ini hanya mungkin dapat tercipta jika ada iklim persamaan, keadilan dan kebebasan. Papua Baru membentuk tata politik baru yang menekankan apresiasi semakin meningkatkan hak asasi manusia, demokrasi yang lebih besar, solidaritas yang lebih efektif sebagai perwujudan perjuangan antara kebaikan melawan kejahatan, antara sistim yang tertutup dengan keterbukaan humanitas yang menunjukkan proses perubahan melalui reformasi (bdk. Ellacuría, 1993<sup>3</sup>: 314-321).

## Rakyat Papua yang Menderita dan Prinsip Keselamatan Universal

Menempatkan pengalaman rakyat yang menderita sebagai fokus refleksi tentang sumber keselamatan merupakan skandal bagi banyak pengikut Kristus. Dalam kelompok masyarakat kelas menengah ke atas; kekayaan, kenyamanan, sehat, umur panjang dipandang sebagai berkat Tuhan. Kemiskinan, penderitaan, penyakit dan mati muda, gampang dianggap sebagai hukuman bahkan kutukan Tuhan. Sejarah keselamatan kristiani menunjukkan banyak bukti yang sebaliknya. Justru orang-orang yang dekat dengan Tuhan mengalami banyak penderitaan misalnya disiksa, dianiaya, dieksekusi. Para nabi dalam Perjanjian Lama, para rasul dalam Perjanjian Baru, para kudus dan martir dalam tradisi Gereja menurut keyakinan kristiani adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan tetapi justru merekalah yang paling sering mengalami penderitaan selama hidup dan mereka ada yang mati dieksekusi. Yoh 18-19 secara tegas menunjukkan bahwa Yesus yang adalah Allah dalam sejarah mengalami penderitaan dalam proses pengadilan kilat yang berpuncak pada eksekusi di salib. Sejarah hidup Yesus menunjukkan dengan jelas sejarah penolakan terhadap-Nya yang berarti penolakan akan Allah. Apa yang merupakan aib di mata dunia menjadi sumber keselamatan di mata Allah (bdk. 1Kor. 1: 23-28).

Berefleksi tentang penderitaan rakyat Papua sebagai prinsip keselamatan universal perlu menempatkan penderitaan rakyat Papua sebagai sebutir embun dari samudera raya permasalahan kemiskinan, penindasan, kekerasan dan kematian yang dialami oleh mayoritas rakyat seluas dunia terutama justru dialami oleh wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Dengan menempatkan penderitaan rakyat Papua dalam konteks penderitaan rakyat semesta, akan ditelusuri adakah sesuatu yang menyelamatkan yang datang dari penderitaan rakyat Papua? Bagaimana keselamatan itu dibawa oleh rakyat Papua? Refleksi ini menjadi penting pada saat rakyat Papua mulai memasuki era Otonomi Khusus dan terjadinya pemekaran-pemekaran kabupaten di Papua dan akhir-akhir ini berkembang RUU pemekaran Provinsi Papua menjadi beberapa provinsi yang kontroversial.

Penderitaan yang dialami oleh rakyat Papua membangkitkan *sense of humanity*, naluri kemanusiaan bagi bangsa-bangsa lain yang mengikuti dengan cermat kisah sengsara rakyat Papua. Rakyat Papua telah memicu bangkitnya kesadaran akan kemanusiaan universal bagai terang yang menerangi bangsa-bangsa lain. Kesadaran kemanusiaan universal tersebut telah mendorong terciptanya solidaritas di antara para penderita yang mengalami penindasan regim yang berkuasa. Begitulah tercipta solidaritas kemanusiaan yang sejati antara rakyat di Aceh yang beragama Islam, berambut lurus, berkulit putih, ras mongoloid, berbudaya Melayu dengan



rakyat Papua yang beragama kristen, berambut kriting, berkulit hitam, ras negroid, berbudaya Melanesia. Tercipta kesadaran persaudaran sejati yang mengatasi sekat-sekat agama, ras dan kebudayaan. Kesadaran kemanusiaan universal telah memperkuat jaringan kerja dan kerja sama antara semua pihak yang berkehendak baik seluas dunia dan sejauh jangkauan. Hal ini menyata dengan kehadiran utusan khusus sekjend PBB urusan HAM di tanah Papua, kepedulian sejumlah anggota kongres Amerika Serikat, perhatian sejumlah pihak di negeri Belanda terhadap situasi Papua. Isu-isu pelanggaran HAM di Papua pun mendapat perhatian luas beberapa kalangan di Australia. Jaringan kerja dan kerja sama ini menjadi embrio akan tanggungjawab global terhadap realitas penderitaan rakyat Papua. Ini dapat menunjukkan bahwa dari balik penderitaannya, rakyat Papua mengendalikan situasi mempersatukan banyak pihak. Penderitaan rakyat Papua menjadikan sejumlah warga dari bangsa-bangsa yang beraneka bersatu.

Rakyat Papua yang menderita dapat menunjukkan kepada dunia nilai-nilai keutamaan seperti kesederhaan, pelayanan dan kesediaan menerima perbedaan. Mereka memiliki potensi untuk mengajarkan kepada dunia bahwa keutamaan hidup bukan terletak pada apa yang dimiliki tetapi apa yang dibagi. Dalam kemiskinan makna hidup terletak pada membagi kekurangan dan secara efektif memanfaatkan bagian yang ada padanya. Dengan kata lain, rakyat Papua yang menderita memiliki potensi kemanusiaan karena mereka menawarkan kebersamaan melawan individualisme, kerja sama melawan kepentingan diri sendiri, kesederhanaan melawan kemakmuran dan perdamaian melawan kekerasan, kebebasan mengatasi penindasan. Ketika terjadi kerusuhan dengan kedok agama di Ambon, tersebar isu kerusuhan akan merembes ke Papua, rakyat Papua merapatkan barisan bersatu lintas agama mengumandangkan "Papua Tanah Damai". Penderitaan telah mengajarkan betapa pentingnya nilai manusia.

Penderitaan rakyat Papua telah membuat jati diri kepapuaan mencuat ke permukaan dan mendapat pengakuan dari komunitas lain bahwa rakyat Papua sungguh ada. Pengakuan ini merupakan suatu proses awal untuk mengungkap kebenaran yang ditutupi selama ini, entah secara sengaja atau tidak sengaja oleh regim yang berkuasa. Banyak kejahatan mulai tersingkap dan *memoria passionis* secara perlahan mulai dikisahkan secara terbuka dari satu orang kepada orang lain, dari satu komunitas kepada komunitas lain dan dari satu bangsa kepada bangsa lain. Pemenjaraan kebenaran melalui pembohongan dan pengalihan permasalahan merupakan "dosa" fundamental terhadap setiap pribadi rakyat Papua dan rakyat Papua secara keseluruhan. Penderitaan rakyat Papua merupakan suatu kekuatan yang menyingkap dosa masa lalu dan mendatangkan pertobatan bagi pihak-pihak yang telah menindas. Gus Dur merasa berkewajiban moral untuk mengakui kesalahan pemerintah Indonesia dengan mengganti nama Irian



Jaya menjadi Papua serta membolehkan bendera Bintang Kejora digunakan sebagai simbol daerah Papua dikibarkan bersama dengan bendera Merah Putih. Pemerintah kerajaan Belanda merasa wajib memulihkan rasa bersalah dengan menyelidiki secara proporsional proses peralihan Papua dari Belanda ke Indonesia. Rakyat Papua merasa bangga menggunakan nama diri Papua secara terbuka. Rakyat Papua merasa dihormati oleh dunia internasional karena mendapat dukungan dari bangsa-bangsa lain. Penderitaan ternyata serentak juga menjadi pemuliaan.

Rakyat Papua yang menderita menghadapi penderitaan dengan mengolah langkah demi langkah sambil mengakui bahwa mereka menderita. Rakyat membangun mekanisme untuk melanjutkan kehidupannya dengan tidak mau melarikan diri dari penderitaan. Rakyat tidak terbius dan membusu dalam penderitaan tetapi sadar bahwa mereka menderita dan berteriak agar terbebas dari penderitaan. Penderitaan telah mengajarkan kepada mereka bahwa kebisuan adalah sahabat penindas tetapi teriakan merupakan jalan keluar membuka diri memanggil sahabat untuk berada di samping mereka atau setidaknya menyadarkan penindas akan perbuatannya. "Jikalau kata Ku itu salah, tunjukkanlah salahnya, tetapi jikalau kata Ku itu benar, mengapakah engkau menampar Aku?" (Yoh. 18: 23). Rakyat Papua yang tak pernah berhenti mengatasi penderitaan membangkitkan daya imajinasi mereka untuk keluar dari kesulitan. Bahkan manakala seluruh upaya untuk keluar dari kesulitan menemukan jalan buntu dan penderitaan seakan tak kunjung henti, rakyat Papua ditantang untuk menemukan *orthopathema*, suatu cara yang benar untuk menderita. Cara yang benar untuk menderita, terjadi manakala

"ortodoksi kita dihancurkan dan ortopraksis kita menjadi sia-sia. Ortodoksi dihancurkan oleh kekerasan dengan cara heterodoksi, suatu cara beriman lain. Ortopraksis kita ditandingi oleh cara bertindak yang lain. Pada inti *orthopathema* terdapat suatu tindakan kepercayaan yang mendasar, suatu iman akan ceritera kehidupan yang baru. Kepercayaan dasar itu mesti berada pada tingkatan dan intensitas yang sama yang memungkinkan kita percaya akan simbol-simbol dan ceritera-ceritera yang pada mulanya membentuk jati diri kita" (Schreiter, 2000: 42-43).

Mama Yosepha Alomang atau pun gerakan Zakeus Pakage menjadi saksi hidup akan *orthopathema*. Penderitaan membangkitkan harapan yang kuat bahwa saat pembebasan akan datang, bukan oleh siapa-siapa tetapi oleh perjuangan mereka sendiri.

Rakyat Papua yang menderita mampu mengusahakan keselamatan. Keselamatan dipahami bukan sebagai pemberian Otonomi Khusus, hadirnya MRP, pemekaran wilayah-wilayah, pembagian dana pemberdayaan



kampung. Bagi rakyat Papua yang menderita keselamatan model ini hanya menguntungkan segelintir oportunis, sekelompok politisi instan yang memperalat mereka, sejumlah birokrat eksekutif yang memperdaya mereka. Mereka sudah banyak belajar bagaimana ditipu. Rakyat semakin sadar bahwa kaum oportunis setelah mencapai tujuan, akhirnya akan meninggalkan mereka. Keselamatan yang diusahakan adalah kemampuan untuk berusaha sendiri. Mereka berusaha menyusun kembali kemampuan mereka, berpikir kritis dan percaya pada diri sendiri keluar mencari jalan sendiri untuk mengatasi penderitaan. Mereka membangun kembali kenangan mereka pada masa lalu atas keberhasilan dan kemakmuran yang mereka alami. Kenangan ini bukan untuk menciptakan romantisme masa lalu dan menemukan firdaus yang hilang, tetapi untuk memberikan kepercayaan diri bahwa mereka sendiri mampu. Orang lain hanyalah pendukung perjuangan mereka. Contoh yang cocok untuk kasus ini adalah pengalaman sejumlah pastor di Baliem. Pada hari minggu ketika pastor menyapa umat Katolik yang ada di pasar dengan sapaan "tidak ke gereja kah?" dijawab "gereja, makan kah?", atau kegiatan pemerintahan di kampung di mana mereka tidak terlibat dan ditanya alasannya, segera dijawab; "pemerintah makan kah?".<sup>32</sup> Penderitaan membuat rakyat semakin kritis dan tidak gampang diprovokasi.

Sampai di sini kita telah mendiskusikan dua bagian artikel ini. Pada bagian pertama dibahas realitas rakyat Papua masa kini dengan mengungkapkan sejumlah penderitaan yang dialami oleh mayoritas rakyat Papua. Pada bagian kedua diskusi difokuskan pada refleksi teologis terhadap realitas, sebuah soteriologi terhadap rakyat Papua yang menderita. Selanjutnya pokok perhatian kita akan terpusat pada manakah tugas gereja terhadap rakyat Papua. Dalam membicarakan tugas panggilan Gereja pijakannya pada empat pengalaman penderitaan rakyat Papua dan horisonnya adalah soteriologi penderitaan rakyat Papua. Di samping alasan teknis ilmiah (koheren dan sistimatisnya sebuah tulisan), juga alasan fundamental. Orang miskin dan tertindas merupakan tempat berpihaknya Allah. Artinya mereka merupakan alamat dari alasan pewartaan Kerajaan Allah (pokok pewartaan dari Yesus). Oleh karena itu tata hidup bersama antara manusia dalam hubungan dengan kerajaan Allah harus dibangun di sekitar dan untuk mereka yang menderita. Dengan memprioritaskan tata hidup pada orang-orang yang menderita seluruh bangsa manusia

---

<sup>32</sup> Jenis percakapan seperti ini mau menunjukkan bahwa rakyat mempersoalkan manfaat langsung suatu kegiatan. Hal yang bersifat janji sebagaimana terjadi sebelumnya, tidak akan digubris lagi. Mereka mulai mempersoalkan untuk kepentingan siapakah kebijakan ada dan kegiatan yang dilaksanakan.



terselamatkan karena mayoritas penduduk dunia adalah orang miskin, suatu representasi yang valid dihadirkan oleh rakyat Papua yang menderita.

### Tugas Panggilan Gereja

Konsili Vatikan II merumuskan Gereja sebagai sakramen keselamatan dunia (LG: 1, 9, 48; GS: 1, 11, 45). Tugas Gereja adalah melanjutkan karya keselamatan Kristus di dunia dengan mengikuti pewartaan Yesus, yakni kerajaan Allah, sebagai ufuk yang harus dikejar. Kerajaan Allah merupakan titik utopia warta kristiani. Utopia kristiani harus terlaksana dalam sejarah. Dengan kata lain, pewartaan kristiani mengejar *sesuatu* yakni, Kerajaan Allah, tetapi *yang* dikejar harus menjadi nyata terlaksana dalam sejarah.

48

Dalam konteks penderitaan rakyat Papua, panggilan Gereja Papua meliputi tiga hal penting (bdk. Burke, 2000: 194). Pertama, Gereja sebagai sakramen harus menginkarnasikan Kristus dalam sejarah. Gereja harus menjadi tubuh Kristus secara tepat dengan mengikuti teladan Yesus dalam sejarah. Gereja hadir di dunia untuk menampakkan kelangsungan karya Kristus di tengah umat manusia. Gereja menjadi daging sejarah Yesus, menjadi tubuh Kristus historis untuk melanjutkan dalam sejarah apa yang telah diperbuat Yesus, yakni menghadirkan Allah di tengah umat manusia (Ellacuría, 1993: 546). Maka dalam karya pewartaan dan pendagingan berita Injil, Gereja dipanggil untuk menyingkirkan dosa dari dunia dan mengkomunikasikan keselamatan. Gereja menempatkan misinya secara menyeluruh untuk melawan ketidakadilan demi keadilan. Oleh karena itu Gereja terlebih dahulu perlu mengakui bahwa entah sadar atau tidak Gereja sendiri telah memberi kontribusi atas penindasan dan ketidakadilan terhadap manusia, kemudian mengambil sikap yang tegas untuk menentang ketidakadilan dengan mengutuk bahwa ketidakadilan adalah dosa. Gereja harus mewartakan bahwa hanya ada satu cara menyeberangi dosa menuju kebangkitan manusia baru yakni, melalui *metanoia* pribadi dan revolusi struktural. Mengubah struktur sejarah yang menindas menjadi struktur sejarah yang membebaskan, mengubah struktur dosa menjadi struktur rahmat (bdk. Ellacuría, 1976: 114-115)

Kedua, Gereja menjadi tubuh historis Kristus dengan menjadi sesama bagi orang lain, terlibat dalam penderitaan dan perjuangan mereka, kegembiraan dan kemuliaan mereka. Dengan kata lain, Gereja sebagai tubuh historis Kristus harus menjadi Gereja rakyat Papua yang menderita. Jika orang miskin menghadirkan tubuh Kristus dalam sejarah, jika kejahatan dalam sejarah adalah kelanjutan penyaliban Yesus dalam sejarah, maka Gereja harus berada bersama rakyat Papua yang menderita, dengan mewartakan keyakinan iman akan keselamatan dengan berjuang menentang



ketidakadilan dan menawarkan keadilan, menentang kekerasan dengan mengusulkan perdamaian, menolak pembohongan dengan mencari kebenaran, menolak kematian guna menemukan hidup. Perjuangan untuk membela rakyat Papua yang menderita merupakan upaya pembebasan dan penyelamatan manusia dari penyaliban dan penindasan. Gereja sebagai sakramen keselamatan memiliki tugas ganda yakni, menguatkan dan meningkatkan perjuangan untuk keadilan di antara mereka yang tidak peduli terhadap keadilan. Pada saat yang sama Gereja membawa mereka yang peduli akan keadilan dan menempatkan perjuangan keadilan ke dalam cinta kristiani (bdk. Ellacuría, 1993: 556).

Ketiga, praksis keselamatan Gereja dibimbing oleh Roh Kudus yang melanjutkan hidup dan perutusan Yesus dalam sejarah. Artinya, karya Gereja sebagai tubuh historis Kristus dan Gereja sejati perlu senantiasa berada bersama rakyat yang menderita. Gereja hadir bukan menjadi provokator merohanikan penderitaan, membangun sikap spiritualisme yang *solipsis* demi kesalehan pribadi tetapi "harus menurunkan rakyat tersalib dari salib" sebagai tindakan penyelamatan nyata.<sup>33</sup> Dalam bertindak, Gereja harus mengikuti benang merah sejarah keselamatan, meneladani jejak para nabi dan mencontoh Yesus yang dengan tegas berkonfrontasi dengan pemegang kekuasaan dunia yang tidak adil. Gereja mendagingkan bahwa Allah penyelamat secara aktual bekerja di tengah umat manusia, bekerja untuk keadilan sebagai jalan menuju perdamaian dan pembebasan yang parnipurna, bertindak untuk membangun relasi yang sempurna antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemimpinnya, rakyat dengan lingkungan dan rakyat dengan Tuhannya. Dengan demikian Gereja menjadi tanda yang dapat dipercaya berjuang melawan semua bentuk ketidakadilan dalam sejarah. Gereja berjuang menyingkirkan dosa dan menginkarnasikan Allah yang hidup. Gereja hadir dalam relasi antar umat manusia, menyejarahkan Allah di dunia (bdk. Ellacuría, 1993: 549).

Dibutuhkan keberanian Gereja, (umat dan pemimpinnya), untuk menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada Rakyat. Sikap netral dari Gereja hanya mau menunjukkan ketidakpedulian terhadap rakyat. Keberpihakan tersebut pertama-tama dengan membangkitkan kesadaran

---

<sup>33</sup> (We) *must be to bring them* (the Crucified Peoples) *down from the cross*. Kutipan Sobrino dari Ellacuría (Lih. Sobrino, 1990: 120). Dalam kurung oleh penulis. Kiranya ini sejajar dengan kata-kata Yesus ketika orang banyak yang mengikuti-Nya kelaparan. Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Kamu harus memberi mereka makan" (Luk 9: 13). Bas Suebu SH, Gubernur Papua, dalam sambutannya pada Pembukaan Sinode Keuskupan Jayapura, November 2006, juga menggunakan kata-kata Luk 9:13, untuk mengajak umat katolik agar memperhatikan juga kehidupan sosial kemasyarakatan.



pada diri rakyat bahwa mereka sebenarnya tidak menderita tetapi dibuat menderita dan karenanya harus berjuang untuk keluar dari penderitaan. Kemudian bersama rakyat melawan setiap kekuatan yang mendatangkan penderitaan, membongkar praksis politik yang menyengsarakan rakyat.

### Penutup

Bacaan Injil tentang Kisah Sengsara Yesus pada Minggu Palma dan Jumat Agung merupakan ritus liturgis Gereja Katolik untuk mengenang dan merayakan penderitaan dan kematian Yesus. Kebiasaan devosi jalan salib pada waktu ziarah dan dalam masa pra-paskah merupakan praktek askese Katolik yang patut dihargai. Ritus liturgis dan sikap devosional atas sengsara Yesus baru bermakna jika menghasilkan transformasi dalam struktur hidup bersama. Pertama-tama bacaan liturgis dan praktek devosional berfungsi sebagai *daya dari dalam* untuk dapat membaca tanda-tanda zaman dengan mengidentifikasi penderitaan real yang dialami rakyat Papua. Daya dari dalam ini semacam suatu spiritualitas untuk menemukan Yesus yang menderita hadir dalam diri rakyat yang menderita. Dengan demikian terbangun suatu kemungkinan dan tekad untuk bertindak menjumpai Yesus yang menderita melalui rakyat yang menderita dan bahwa perjumpaan dengan Kristus melalui bacaan yang didengar dan praksis jalan salib yang dilakukan dapat diaktualisasikan dalam hidup kongkrit. Rasa terharu karena pengadilan yang tidak adil terhadap Yesus dan bermuara pada kematian-Nya baru bermakna kalau keharuan itu melahirkan tindakan membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan bagi rakyat yang menderita. Tangisan yang mengucur saat mengikuti devosi jalan salib hanya bermakna kalau air mata duka tersebut mengalirkan perbuatan nyata bagi pembebasan rakyat yang menderita. Penderitaan Yesus tak perlu ditangisi, yang perlu ditangisi adalah ketidakmampuan kita sebagai murid-murid Kristus dalam mewujudkan kehadiran Allah di dunia. "Janganlah kamu menangisi Aku, tetapi tangislah dirimu dan anak cucumu" (Luk. 23: 28) yang tidak bertindak manakala menyaksikan ketidakadilan, penindasan, kekerasan, kematian.



### Daftar Rujukan

Alua, Agus A. 2000. *Papua Barat dari Pangkuan ke Pangkuan. Suatu Ikhtisar Kronologis*. Seri Pendidikan Politik Papua No. 1. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

- Alua, Agus A. 2002. *Peringatan 41 Tahun Tragedi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Di Tanah Papua dan Kemerdekaan Papua Barat*, Seri Pendidikan Politik Papua No. 6. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- BKKBN Papua. 2002. *Keluarga Prasejahtera – Keluarga Sejahtera Provinsi Papua*, Jayapura (laporan)
- BPS Provinsi Papua dan BAPEDALDA. 2003. E-Book *Papua Dalam Angka*.
- Burke, Kevin F. 2000. *The Ground Beneath the Cross; The Theology of Ignacio Ellacuría*, Washington: Georgetown University Press.
- Djopari, John R.G. 1995. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: Grasindo.
- Drooglever, Prof. Pieter J. 2005. “Een daad van Vrije Keuze de Papoeas’s van Westelijk Nieuw-Guinea”, (ringkasan), diterjemahkan oleh SKP Jayapura. Jayapura: SKP Jayapura.
- Ellacuría, Ignacio. 1976. *Freedom Made Flesh. The Mission of Christ and His Church*. Terj. John Drury. New York: Orbis Books.
- 1993. The Church of the Poor, Historical Sacrament of Liberations, dalam Ignacio Ellacuría & Jon Sobrino (ed.). *Mysterium Liberationis*. New York: Orbis Books, hlm. 543-563.
- 1993<sup>1</sup>. “The Crucified People,” dalam Ignacio Ellacuría & Jon Sobrino, (ed.) *Mysterium Liberationis*. New York: Orbis Books, hlm. 580-603.
- 1993<sup>2</sup>. “The Historicity of Christian Salvation,” dalam Ignacio Ellacuría & Jon Sobrino, (ed.) *Mysterium Liberationis*. New York: Orbis Books, hlm. 251-288.
- 1993<sup>3</sup>. “Utopia and Prophecy in Latin America,” dalam Ignacio Ellacuría & Jon Sobrino, (ed.) *Mysterium Liberationis*. New York: Orbis Books, hlm. 288-327.
- Groenen, Dr. C. 1994. *Analisis Naratif Kisah Sengsara Yesus (Yoh. 18-19)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Herlina. 1985. *Pending Emas (Bergerilya di Belantara Irian)*. Jakarta: Gunung Agung
- Kanwil Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. 2001. *Lokasi dan Jenis Bahan Galian di Provinsi Papua*. Jayapura (laporan).

- Moelino, Laurike. 2005. *Panduan tentang Pencegahan HIV/AIDS Bagi Orang Papua. Bagaimana Kitorang bicara dengan Remaja tentang HIV/AIDS di Tanah Papua*. Jakarta: UNICEF.
- Osborne, Robin. 1985. *Indonesia's Secret War. The Guerilla Struggle In Irian Jaya*. Sydney: Allen & Unwin.
- Pemerintahan Daerah Propinsi Irian Barat. 1972. *Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) Di Irian Barat 1969*. Djayapura: Pemerintahan Daerah Propinsi Irian Barat.
- Pigay, Decki Natalis BIK. 2001. *Evolusi Nasionalisme Dan Sejarah Konflik Politik Di Papua*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Raweyai, Yorrays T. 2002. *Mengapa Papua Ingin Merdeka*. Kotaraja: PDP.
- School, Pim. 2001. *Belanda di Irian Jaya. Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1962*. Jakarta: Garba Budaya-KTLV.
- Sobrin, J. 1990. "The Crucified People: Yahweh's Suffering Servant Today. In Memory of Ignacio Ellacuría", dalam *Concilium*, 6, hlm. 120-129.
- Soemardjan, Selo. 1980. "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan" dalam Alfian (ed) *Kemiskinan Struktural. Suatu Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Ilmu Sosial.
- Stambaugh, John-David Balch. 1997. *Dunia Sosial Kekristenan Mula-Mula*, (terj. Suleman Stephen). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sugiono, Bambang; Maftuh Effendi, Yusak Elisa Reba, Wiguno Teguh Mulyo (ed). 2005. *Otonomi Kbusus Papua. Refleksi Peristiwa 21 November 2001 s/d 23 Desember 2004*. Jayapura: ICS Papua dan Partnership for Governance Reform in Indonesia.
- Umar, Prof. Dr. Hasan Basri dan Drs. Adolf Z. D. Siahay, SE., M.SI., AK. 2006. *Papua. Potret Pengelolaan Keuangan Daerah & Pelayanan Publik*. Makasar: Refleksi.

[www.papua.go.id/bps/dda%202002/SOSIAL.htm](http://www.papua.go.id/bps/dda%202002/SOSIAL.htm).

[www.undp.go.id/final\\_reports\\_2004](http://www.undp.go.id/final_reports_2004).

